



Edisi 2025 ISSN 1979-4738

**Audiensi Animal Friends Jogja
Bersama DPRD Bantul**

**Gardu Projotamansari Menyulam Harapan
Kabupaten Bantul Lima Tahun ke Depan**

**Badan Anggaran DPRD Bantul
Matangkan KUA Perubahan dan PPAS 2025**

**Komisi DPRD Bantul Undang OPD
untuk Bahas Penjajagan PPAS 2025**

**Pansus D DPRD Bantul Matangkan Raperda
Penyelenggaraan Pendidikan Karakter
Berbasis Nilai Welas Asih**

**Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bantul
Resmikan Perubahan KUA dan PPAS 2025**

**Komisi C DPRD Bantul Sidak Pembangunan
Irigasi dan Jembatan Sindet 2**

Media Komunikasi DPRD Kabupaten Bantul
Biwara
Berita Wakil Rakyat

Susunan Redaksi



Penanggung Jawab
Pimpinan DPRD Bantul

Pimpinan Redaksi
Praptanugraha, S.Sos.,MH

Wakil Pimpinan Redaksi
Anton Vektori, S.STP, M.Eng.

Redaktur
Hari Triwahyudi, S.IP., M.Sc.

Redaktur Pelaksana
Didik Fatmoko, S.I.Kom.

Sekretaris Redaksi
Nanik Apriyani, A.Md.

Staf Redaksi
Endaryati Widiastuti, S.E.

Fotografer
Didik Fatmoko, S.I.Kom.

Distribusi
Tugiyat
Diana Zain Rahmawati, S.Sos.



Website : dprd.bantulkab.go.id



Facebook : DPRD Kabupaten Bantul



Instagram : @dprd.bantul



Youtube : QDPRDBantul



Jarimas : jarimasdprd.bantulkab.go.id

Salam Redaksi

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Majalah Biwara Edisi Tahun 2025 dapat kembali hadir menyapa para pembaca setia. Kehadiran edisi perdana di tahun ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk terus menghadirkan informasi yang transparan, akuntabel, dan inspiratif mengenai kiprah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan periode yang penuh dinamika sekaligus tantangan bagi DPRD Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tiga fungsi utamanya: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan semangat pengabdian kepada masyarakat, DPRD terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Beragam kegiatan dewan yang kami sajikan di edisi ini mencerminkan semangat kerja DPRD untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Mulai dari Rapat Paripurna, Rapat Pansus, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Komisi, hingga kegiatan Sidak Komisi dan Audiensi bersama masyarakat serta pemangku kepentingan.

Melalui dokumentasi kegiatan ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh gambaran utuh mengenai kiprah dan kinerja DPRD Kabupaten Bantul dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan seluruh pihak yang telah berperan dalam penerbitan Majalah Biwara ini. Semoga Biwara senantiasa menjadi media informasi dan komunikasi publik yang inspiratif, edukatif, serta mempererat hubungan antara DPRD dan masyarakat Bantul.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul

Terbit Perdana : Agustus 2007
Diterbitkan Oleh Sekretariat DPRD
Kabupaten Bantul

Redaktur menerima naskah, Foto dan Materi lainnya sesuai dengan misi BIWARA (Majalah DPRD Kab. Bantul) bagi yang dimuat akan diberikan honor dan dapat diambil di Sekretariat Redaksi
Jl. Jend. Sudirman 85 Bantul Tlp.: 0274 - 367417 Fax: 0274 - 367200



Mengenal **HANUNG RAHARJO** Ketua DPRD Bantul 3 Periode Berturut-Turut

Siapa tak kenal dengan Hanung Raharjo seorang politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah empat periode menduduki menjadi wakil rakyat dan tiga periode berturut-turut menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bantul mulai periode 2014-2019, 2019-2024, dan 2024-2029.

Menjadi anggota DPRD empat periode dan tiga periode berturut-turut sebagai Ketua DPRD Bantul sebuah prestasi politik yang tidak mudah diraih oleh seorang politisi apalagi berasal dari partai pemenang pemilu legislatif tiga kali berturut-turut.

Hanung Raharjo menceritakan ketertarikan masuk dalam organisasi politik saat dirinya menempuh kuliah Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPNV) Yogyakarta hingga pada tahun 2004 lulus kemudian mulai fokus berorganisasi ditingkat kalurahan termasuk menjadi pengurus PDI Perjuangan tingkat kalurahan.

"Saya memang saat kuliah fokus pada kuliah namun sudah tertarik untuk masuk dalam organisasi partai politik. Setelah kuliah itu semakin fokus dalam berorganisasi politik," ujarnya, Kamis (6/11/2025).

Menjadi pengurus ranting DPC PDI Perjuangan Bantul tersebut, Hanung banyak berkenalan dan berdiskusi tentang politik dengan pengurus partai ditingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Dukungan dari keluarga yang utama dan dukungan dari teman-teman dekat serta politisi yang lebih senior akhirnya pada

pemilu legislatif 2004.

"Akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD Bantul periode 2014-2019. Itu awal karir politik saya dari lulusan sarjana teknik menjadi seorang politisi," ungkap pria kelahiran Bantul, 29 Mei 1980 ini.

Karir politik semakin moncer yang sudah cerah sejak menjabat sebagai anggota DPRD Bantul periode 2004-2009 akhirnya menghantarkan untuk kembali duduk sebagai anggota DPRD Bantul terpilih periode 2009-2014.

"10 tahun pengalaman sebagai anggota DPRD Bantul dan juga pendidikan politik yang diberikan oleh PDI Perjuangan kepada kader-kadernya semakin menambah matang dalam kita berpolitik," ungkapnya.

Diakui Hanung berbekal pengalaman selama 10 tahun dan kerja nyata, turun kebawah mengawal aspirasi masyarakat hingga menjadi pengurus partai ditingkat kabupaten menjadi awal dirinya untuk menjadi pimpinan tertinggi wakil rakyat yakni sebagai Ketua DPRD Bantul tiga periode berturut-turut yakni 2014-2019, 2019-2024, dan 2024-2029.

"Saya kira tiga kali menjadi Ketua DPRD Bantul berkat kerja keras dan juga kepercayaan partai yang diberikan kepada saya. Ini tidak mudah dan berat namun harus saya laksanakan," tandasnya.

Beban berat sebagai Ketua DPRD Bantul diakui Hanung saat adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo pada tahun 2025 ini dan juga tahun 2026 yang terjadi pengurangan transfer dana dari pusat ke kabupaten turun Rp150 miliar.

"Nah fungsi dari DPRD khususnya tentang penganggaran ini sangat penting agar anggaran yang sudah minim ini tepat sasaran dan tepat guna," ungkapnya.

Hanung mengatakan dengan adanya penurunan anggaran ini maka program-program yang diajukan oleh eksekutif khususnya Pemkab Bantul harus benar-benar dicermati oleh apakah sudah mencerminkan program prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah atau RPJMD dan rencana pembangunan daerah jangka panjang (RPDJP).

"Komisi-komisi yang ada di DPRD Bantul harus mencermati program-program yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Ya kalau program tidak sesuai dengan prioritas program di RPJMD dan RPDJP maka harus dikoreksi dalam pembahasannya," ungkapnya.

"Jangan sampai program dan anggaran akhirnya tidak sesuai dengan prioritas program dalam RPJMD dan RPDJP justru lolos dan pada akhirnya anggaran tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna," tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Dalam hal melaksanakan fungsi legislasi dalam hal ini membuat peraturan daerah atau perda maka sebagai mitra eksekutif, DPRD harus berani mendorong agar produk-produk perda baik itu inisiatif dari DPRD atau eksekutif adalah peraturan daerah yang berpihak kepada masyarakat semisal perda perlindungan terhadap pedagang pasar tradisional, perda yang menyangkut investasi hingga perda yang menyangkut tentang pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.

"Perda yang dihasilkan diharapkan untuk mendukung jalannya pemerintahan dan meningkatkan ekonomi masyarakat serta memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik seperti layanan kesehatan dan lain-lainnya," terangnya.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi pengawasan yang harus dijalankan oleh DPRD terhadap berbagai program yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD agar anggaran untuk program itu tepat guna dan tepat sasaran dan dikemudian hari tidak ada temuan hukum.

"Sebagai Ketua DPRD saya terus mengingatkan tiga fungsi pokok legislatif agar dijalankan sebaik-baiknya karena pada akhirnya itu semua untuk kesejahteraan masyarakat. DPRD itu ada kan tujuan utamanya untuk mensejahterakan rakyat," tutup pria yang kini memiliki hobi beternak kambing PE ini.



Ketika Panggilan Masyarakat Membawa Suradal ke Dunia Politik

Tak pernah terbesit dalam pikiran untuk menjadi seorang politisi namun dalam perjalanan karirnya sebagai pengusaha mebel kini justru menjabat posisi penting yakni Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bantul. Sosok politisi yang karirnya sukses sebagai pengusaha kemudian 'melenting' menjadi Wakil Ketua I DPRD Bantul tak lain adalah Suradal.

Mengawali usaha mebel pada tahun 1993, Suradal mengaku memiliki tempat penggergajian hingga tempat produksi mebel yang setiap bulannya mengirim pesanan mebel di sekitar Bantul hingga luar kota dan menghasilkan keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga bahkan berlebih sehingga setiap tahunnya bisa membeli tanah di sejumlah lokasi di Bumi Progotamansari.

"Jadi saya tidak pernah sama sekali ada pemikiran menjadi seorang politisi. Wong hidup dari jualan mebel sudah berlebih hasilnya," katanya ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/11/2025).

Perjalan karir politik diawali pada tahun 2014 silam saat sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama yang sebelumnya mendukung calon DPRD Bantul 2009 kemudian terpilih namun dalam pemilu legislatif 2014 harus pindah daerah pemilihan sehingga mencari figur lain untuk maju dari daerah pemilihan yang ditinggalkan oleh calon yang terpilih tersebut.

" Saat itu saya masih menolak desakan dari masyarakat. Namun ada salah satu tokoh Nahdlatul Ulama Kapanewon Kretek yang mendaftarkan dirinya sebagai calon legislatif di Partai Kebangkitan Bangsa. Saat itu saya juga tidak tahu kalau didaftarkan sebagai calon legislatif karena sedang mengirim mebel ke luar kota," ucapnya politisi kelahiran Bantul 1 Juni 1970 ini.

Begitu sampai di rumah dan mengetahui dirinya didaftar sebagai calon legislatif akhirnya berkonsultasi dengan keluar serta meminta petunjuk dari Allah SWT akhirnya memutuskan mantap untuk menjadi calon anggota legislatif dari PKB untuk daerah pemilihan atau Dapil IV yang meliputi Kapanewon Kretek, Bambalipuro, Pundong dan Kapanewon Jetis.

"Ya akhirnya setelah berjuang dalam pemilu legislatif akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD Bantul periode 2014-2019 dan dipercaya oleh partai menjadi anggota Komisi B, DPRD Bantul," ucapnya.



"Ya hidup itu kan tidak hanya mencari penghasilan namun bagaimana juga bisa ibadah untuk membantu sesama umat manusia. Karena menjadi politisi itu justru minus penghasilannya," tambahnya sambil tersenyum.

Pada pemilu legislatif 2019, Suradal mengaku kembali lagi mencalonkan diri sebagai calon legislatif kembali dan kembali terpilih. Pemilih tetap komitmen untuk mendukung dirinya sebab berbagai aspirasi dari masyarakat berhasil ia kawal dan direalisasikan sehingga pemilih tak pindah ke politisi lain meski ada iming-iming politik uang.

"Ya Alhamdulillah dengan mendapatkan dua kursi di Dapil IV Bantul dirinya dipercaya oleh DPP PKB untuk menjabat sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Bantul periode 2024-2029," tutur suami dari Nur Kholifah ini.

Mendapatkan amanah menjadi pimpinan DPRD tentunya tanggung jawab juga bertambah namun disisi lain punya kelebihan dalam hal penganggaran dan program sehingga berbagai aspirasi dari masyarakat lebih mudah direalisasikan dibandingkan hanya menjadi anggota DPRD.

"Ya alhamdulillah kedepan apa yang menjadi aspirasi konstituen saya, masyarakat Bantul bisa direalisasikan," ungkap Suradal yang juga pemilik rumah makan sate

kambing Mbah Suro yang berlokasi di Jalan Samas ini.

Lebih lanjut Suradal mengatakan dirinya juga telah mendapatkan instruksi dari DPP PKB bahwa PKB adalah partai yang terbuka partai yang menjunjung tinggi pluralisme sehingga dalam mengawal dan merealisasikan aspirasi tidak hanya untuk satu golongan atau satu agama atau keturunan namun untuk seluruh masyarakat Bantul tanpa ada sekat.

"Bahkan saya diwajibkan membuat sebuah wadah atau tempat agar tokoh-tokoh agama dari luar muslim bisa masuk bergabung dengan PKB. Bagi saya hal itu bukan sesuatu yang baru sebab saat maju menjadi calon legislatif tahun 2014 ketua tim pemenang saya justru orang nasrani," tuturnya.





Titis Ajeng Ganis Mareti, **Bintang Baru di Legislatif Bantul Murni Mengabdikan untuk Rakyat**

BANTUL - Titis Ajeng Ganis Mareti menjadi satu-satunya perempuan yang berhasil menduduki kursi sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta periode 2024-2029. Ia merupakan bintang baru yang berhasil meraih posisi sebagai Wakil Ketua II DPRD Bantul pada pemilihan anggota legislatif tahun 2024.

Titis, sapaan akrabnya, mengaku murni ingin mengabdikan kepada masyarakat. Sebagai legislatif, ia bisa mendengar, menampung, dan membantu menjawab suara-suara jeritan atau keluhan rakyat. Apalagi, ia juga memperhatikan lingkungan di sekitarnya, sehingga muncul rasa keprihatinan yang perlu dituntaskan dengan menjadi anggota DPRD Bantul.

"Kondisi-kondisi lingkungan yang ada, menggugah saya untuk maju sebagai anggota DPRD Bantul. Dan alhamdulillah, perlahan-lahan permasalahan yang ada kita bantu. Beberapa di antaranya itu terkait pembangunan fisik maupun peningkatan kapasitas. Karena, ternyata hal-hal itu yang selama ini benar-benar

dibutuhkan oleh masyarakat kita," katanya, Senin (27/10/2025).

Disampaikannya, sejauh ini sudah banyak program yang ia jalankan untuk masyarakat. Rata-rata program kerja itu dilakukan di bidang peningkatan kapasitas untuk kaum ibu-ibu di wilayah daerah pemilihan (Dapil) dua atau mencakup Kapanewon Piyungan dan Kapanewon Banguntapan. Beberapa program kegiatan peningkatan kapasitas itu berupa sosialisasi memasak, sosialisai antisipasi dan menangani kebakaran, pelatihan budidaya ikan, hingga program padat karya.

Politikus dari Partai Gerindra ini juga mengatakan, dari kegiatan itu ada dampak positif yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Terutama dalam program padat karya atau pembangunan infrastruktur. Di mana, program itu membuka lapangan kerja bagi masyarakat walau bersifat sementara dan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat. Sebab, program padat karya itu dilajukan untuk menunjang pembangunan beberapa kawasan di Bumi Projo Tamansari.





"Dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat, kalau bidang infrastruktur jelas sudah terasa dan ada bedanya ya menjadi lebih positif. Tapi, kalau yang lainnya seperti peningkatan kapasitas atau pelatihan-pelatihan itu, pengetahuan masyarakat kita ternyata semakin bertambah sehingga membuka lowongan pekerjaan baru untuk masyarakat kita yang benar-benar membutuhkan," jelasnya.

Dalam pelatihan memasak, kata Titis, juga sangat berguna untuk masyarakat. Pasalnya, mereka yang mendapatkan pelatihan baru memasak itu memiliki usaha catering atau kuliner. Dengan begitu, hasil pembelajaran memasak itu bisa mendorong kreativitas atau motivasi baru dalam meluncurkan varian makanan baru. Inovasi makanan baru itu diharapkan menjadi daya tarik konsumen, sehingga terdapat perputaran uang yang baik di lingkungan masyarakat.

Ibu dari tiga anak ini juga menyampaikan sempat memberikan sejumlah bibit ikan untuk dilakukan budidaya oleh masyarakat setempat. Hasil dari ikan budidaya itu dijual dan omzet yang didapatkan dari hasil penjualan dilakukan untuk menjalankan budidaya itu kembali. Tidak hanya bibit ikan lele saja, ia juga sempat memberikan bibit ayam untuk masyarakat agar diteruskan sebagai mata pencaharian baru.

"Program yang dijalankan pada tahun 2025 ini, alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah dana aspirasi atau pokok pikiran saya habis untuk merealisasikan program itu. Dana aspirasi saya pada tahun 2025 ini ada sekitar Rp3,5 miliar. Rencananya, pada tahun depan akan ada kegiatan yang sama dengan penerima program atau masyarakat yang berbeda dari tahun sebelumnya. Anggaran yang akan diberikan tahun 2026 juga rencananya sama dengan tahun sekarang," urai dia.

Dengan begitu, pihaknya berharap selama masa jabatannya belangsung, masyarakat secara merata bisa mendapatkan dampak yang positif dalam hal peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup. Akan tetapi, ia mengakui bahwa anggaran aspirasi yang diberikan tersebut tergolong sedikit mengingat masa jabatan yang dilalui dalam satu periode hanya lima tahun. Maka dari itu, ia berupaya all out untuk

mendukung kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya berhenti di situ saja, walau menjadi wajah baru di legislatif Bumi Projotamansari, ternyata ia juga pernah berkomitmen untuk ikut andil mewujudkan swasembada pangan Bumi Projotamansari. Apalagi, swasembada pangan itu menjadi salah satu asta cita Presiden Kedelapan RI, Prabowo Subianto.

Ia turut menilai bahwa Kabupaten Bantul juga menjadi salah satu lumbung pangan di DIY. Tak heran, jika perempuan kelahiran tahun 1985 ini juga telah berpartisipasi memperjuangkan nasib para petani dengan menyalurkan pemberian alat mesin pertanian (Alsintan). Di mana, Alsintan itu ada yang didapatkan dari berbagai pihak termasuk Ketua Komisi IV DPR RI dan langsung dibagikan kepada para petani melalui gabungan kelompok tani pada beberapa waktu lalu.

"Bantuan ini bukan sekadar simbol kehadiran negara. Ini adalah nafas baru bagi pertanian kita. Traktor yang diserahkan akan menjadi alat perjuangan petani untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya, dan membuka pintu bagi generasi muda untuk kembali mencintai tanah mereka. Sebagai wakil rakyat di Bantul, saya akan mengawal penuh pendistribusian dan pemanfaatan alsintan ini, agar tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani," tuturnya.

Menurutnya, kehadiran Alsintan pemberian Komisi IV DPR RI itu bukan menjadi akhir. Langkah tersebut dinilai menjadi awal dari pertanian Bumi Projotamansari yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing. Pasalnya, ia menilai bahwa petani bukan sekadar profesi, mereka adalah penjaga perut bangsa yang perlu dihormati dan diberikan kemudahan dalam mengelola lahan pertanian lokal.

"Tentu saya berharap, ke depan saya dapat berjalan lebih baik lagi dan bisa banyak bertemu dengan masyarakat untuk mendengar dan membantu keluhan masyarakat kita tercinta. Kemudian, apa yang saya bawa itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena, kita bekerja dan bergerak murni untuk masyarakat dan bersama-sama membangun Kabupaten Bantul yang lebih baik lagi," pinta dia.

Melihat Jejak Karier Agung Laksmono,

Dari Aktivis Sosial Kini Sukses Jadi Wakil Ketua DPRD Bantul Periode 2024-2029

BANTUL - Sosok Agung Laksmono, sudah tidak asing lagi di telinga lembaga legislatif Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Politisi daerah pemilihan (Dapil) Bantul satu atau Kapanewon Bantul dan Kapanewon Sewon ini sudah melenggang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul sejak puluhan tahun yang lalu.

Agung mengakui ada banyak lika-liku perjalanan yang mengawali karirnya di DPRD Kabupaten Bantul sebelum kini menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul periode 2024-2029. Sebab, sejak awal, ia telah bertekad untuk memiliki pekerjaan yang bermanfaat bagi banyak pihak, termasuk masyarakat.

"Secara prinsip, saya ingin bekerja dengan memberikan peran dan manfaat nyata untuk orang lain. Rasa itu membuat saya aktif dan terdorong dalam berbagai kegiatan sosial dan pernah ikut bersama-sama mengelola partai baru yakni Partai Keadilan pasca reformasi," katanya, Selasa (28/10/2025).

Laki-laki kelahiran 1972 ini pun pernah menjadi pengurus atau Ketua DPC Partai Keadilan Kapanewon Banguntapan pada 1998-1999 dan Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kapanewon Banguntapan pada 2001-2004. Keaktifan dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat itu membuat Agung memperoleh



kursi sebagai anggota DPRD Bantul mulai tahun 2004.

Ternyata, ia berhasil menjadi anggota DPRD Bumi Progotamansari selama dua priode yakni 2004-2009 dan 2009-2014. Kemudian, pada 2015-2016, ia aktif menjadi Sekretariat Parampara Praja DIY dengan pekerjaan yang cukup kompleks yakni menyusun konsep kebijakan pertanahan dan tata ruang keistimewaan DIY.

Bahkan, Agung sempat menjadi konsultan bidang kebijakan publik, perencanaan pembangunan, dan lingkungan selama 2015-2024. Di mana, semua pekerjaan yang diemban selama ini memberikan dampak positif untuk pembangunan dan lingkungan masyarakat. Pasalnya, seluruh pekerjaan itu memiliki isu strategis untuk kesejahteraan masyarakat.

"Kemudian, saya maju lagi menjadi anggota dewan (DPRD Bantul) dan terpilih sebagai Wakil Ketua DPRD Bantul periode 2024-2029. Dalam jabatan kali ini, saya memiliki cukup banyak target kerja sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang itu merupakan kesepakatan antara Bupati dengan DPRD Bantul. Hal itu yang akan menjadi prioritas kerja kita sebelum lima tahun nanti," tuturnya.

Dikatakannya, segala kegiatan maupun pekerjaan yang dilakukan selama ini berjalan sangat selaras dengan latar pendidikan Agung. Di mana, Agung sendiri telah mengemban pendidikan Strata 1 atau S1 Jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh, Fakultas Geografi, di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.



Dibalik kesibukannya, ternyata dia juga berhasil meneruskan pendidikan magister atau S2 dengan Jurusan Studi Kebijakan, Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, serta S2 Jurusan Ilmu Lingkungan, Pasca Sarjana Institut Teknologi Yogyakarta.

Program Kerja Agung Laksmono

Dalam kesempatan itu, Agung turut menyampaikan bahwa program kerja yang akan ditekuni selama lima tahun ke depan dilakukan sesuai RPJMD, mulai peningkatan sumber daya manusia, terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan, terwujudnya transformasi penguatan ekonomi masyarakat berbasis budaya lokal dan investasi, terwujudnya transformasi sosial yang berlandaskan budaya, dan terwujudnya transformasi pembangunan infrastruktur yang selaras dengan kelestarian lingkungan sekaligus tanggap bencana.

"Tentunya ketika kita bicara soal Kabupaten Bantul, maka prioritas yang ada dalam RPJMD itu mau tidak mau berkaitan untuk pembangunan Kabupaten Bantul ke depan agar berdampak pada peningkatan potensi ekonomi masyarakat. Tapi, sebelum itu, sumber daya manusia (SDM) kita harus memiliki jaminan kesehatan. Ketika SDM kita sudah memiliki jaminan kesehatan, maka dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Tentunya, untuk jaminan kesehatan itu dapat di-cover melalui berbagai macam," tuturnya.

Selain itu, dalam proses birokrasi layanan publik termasuk pengurusan perizinan di Bumi Projo Tamansari diharapkan ke depan dapat berjalan efektif, efisien, dan ramah terhadap investasi. Ia menilai dalam pembangunan daerah, bagaimana pun juga masih dibutuhkan kehadiran investor. Bilamana pengurusan izin investasi itu dipersulit, maka akan berdampak pada pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, saya juga sudah memberikan pokok-pokok pikiran (Pokir)

sesuai dengan peraturan yang ada. Pokir itu saya gelontorkan untuk peningkatan SDM di bidang ekonomi melalui berbagai pelatihan. Dengan pelatihan itu, diharapkan dapat menumbuhkan pelaku usaha atau pelaku UMKM baru, sehingga masyarakat memiliki pemasukan untuk mendongkrak kehidupan yang lebih sejahtera," ujarnya.

Lebih lanjut, Agung mengatakan ada banyak pelatihan untuk sektor industri rumahan yang diberikan kepada masyarakat terkhusus di Dapilnya saat ini. Sebab, ketika pelaksanaan reses atau kunjungan kerja ke Dapil, ia kerap menemukan masyarakat yang mengeluh kesulitan memperoleh ekonomi dengan baik. Kondisi itu terjadi dikarenakan beberapa faktor termasuk kondisi perekonomian nasional dan lokal.

"Tapi ada juga, karena kebijakan efisiensi anggaran itu berdampak kepada masyarakat. Karena, adanya efisiensi ini kan perputaran uangnya lebih kecil. Kalau begitu kan tentunya masyarakat yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan semakin berkurang. Pada akhirnya, ada yang kehilangan mata pencaharian. Jadi, dana Pokir kami difokuskan ke peningkatan perekonomian," jelasnya.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut, sekitar lebih dari 50 persen masyarakat ada yang perlahan mulai memperoleh pemulihan ekonomi. Namun, ada pula yang masih berjalan dengan pemberian pendampingan. Ia memahami betul keadaan masyarakat saat ini, sehingga siap memberikan pendampingan penuh untuk masyarakat. Pasalnya, output dari program pemberdayaan masyarakat tersebut bermacam-macam dan tidak bisa dipukul rata.

"Tahun depan, rencana saya masih ada pemberian program kegiatan dengan fokus untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Karena, saya paham betul, masyarakat memiliki kebutuhan yang tidak sedikit. Jadi, sebisa mungkin, saya berusaha agar masyarakat kita bisa memiliki lapangan pekerjaan baru dan memiliki kondisi ekonomi yang baik," pinta dia.

Wujudkan Bantul Ramah Anak,

DPRD Dukung Peran Strategis Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul menerima audiensi dari Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) pada Kamis (03/07). Pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi A DPRD Kabupaten Bantul ini menjadi momen penting yang tidak hanya mempererat komunikasi, tetapi juga memperkuat sinergi dalam upaya melindungi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, di wilayah Bantul.

Audiensi ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kab Bantul, Suradal, Wakil Ketua DPRD Kab Bantul, Agung Laksmono S.Si., M.Sc., M.Ling, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab Bantul, Hermawan Setiaji, SIP, MH., Kepala Dinas DP3APPKB, Dra. Ninik Istitarini, Apt., M.PH., ket, Ketua Satgas PPA Kabupaten Bantul, M. Zainul Zain S.Pd, serta sejumlah anggota Satgas PPA dari berbagai kelurahan. Pertemuan ini diwarnai dengan diskusi terbuka, paparan kegiatan, serta pernyataan komitmen bersama dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD, Suradal, menyampaikan apresiasinya atas dedikasi para relawan yang selama ini telah aktif melakukan pendampingan, advokasi, dan penjangkauan terhadap korban kekerasan. Ia menggarisbawahi bahwa persoalan kekerasan terhadap anak menjadi semakin serius, terutama di era digital yang membuka ruang-ruang baru terjadinya kekerasan. Karena itu, menurutnya, penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan perlu terus dikembangkan secara kolaboratif antara

pemerintah, masyarakat, dan lembaga legislatif.

"Kekerasan terhadap anak tidak bisa dianggap sebagai hal biasa. Di era digital ini, mereka terpapar berbagai konten dan interaksi yang berpotensi membahayakan. Maka dari itu, peran Satgas PPA sangat penting sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat," ujar Suradal.

Ia juga menyampaikan harapan agar DP3APPKB dapat terus bersinergi dengan Satgas PPA dalam menyusun dan melaksanakan berbagai program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan di lapangan.

Satgas PPA merupakan merupakan relawan masyarakat yang secara aktif melakukan kerja-kerja sosial untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saat ini Satgas PPA memiliki tugas utama dalam melakukan penjangkauan terhadap korban kekerasan yang dilaporkan ke OPD, penyuluhan kepada masyarakat, serta kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan kelompok rentan.

"Saat ini Satgas PPA Kabupaten Bantul telah memiliki sekitar 110 anggota yang tersebar di 75 kelurahan. Mereka bekerja secara sukarela, mengandalkan semangat kemanusiaan, dan menjadi garda terdepan dalam membangun ekosistem perlindungan pada Perempuan dan Anak", ungkap Zainul selaku ketua Satgas PPA Kabupaten Bantul.



Ia menyampaikan bahwa tujuan utama dari audiensi ini adalah menyamakan visi antara Satgas PPA dan DPRD agar upaya perlindungan anak dan perempuan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab Bantul, Hermawan Setiaji, SIP, MH., dalam tanggapannya menyampaikan rasa terima kasih atas kiprah Satgas PPA yang telah menjadi mitra penting pemerintah daerah. Ia mengakui bahwa kehadiran Satgas PPA di lapangan sangat membantu, terutama dalam memberikan respons cepat terhadap laporan kasus kekerasan dan menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit terdeteksi secara langsung oleh pemerintah.

"Kami sangat berterima kasih karena kehadiran Satgas PPA ini sangat membantu kami dalam mewujudkan program pemerintah khususnya dalam hal perlindungan terhadap Perempuan dan Anak. Kami juga siap untuk terus bersinergi", ungkap Hermawan.

Sementara itu, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Bantul, Dra. Ninik Istitarini, Apt., M.PH., menyampaikan bahwa selama ini pihaknya telah menjalin kerja sama secara erat dengan Satgas PPA. Kolaborasi tersebut, menurutnya, terbukti efektif dalam mempercepat proses penanganan kasus kekerasan serta mendorong upaya pencegahan berbasis komunitas. Ia menekankan bahwa Satgas PPA telah menjadi mitra lapangan yang sangat strategis, terutama dalam hal penjangkauan dan edukasi publik.

"Kami dari OPD selama ini sudah bekerjasama dengan Satgas PPA. Kehadirannya sangat membantu kami dari sisi lapangan. Secara garis besar, apa yang dilakukan oleh Satgas PPA yaitu dalam hal penjangkauan. Jadi laporan yang kami terima akan langsung dijangkau oleh Satgas PPA", ujar Ninik. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya mempertahankan dan memperkuat sinergi dengan Satgas PPA ke depan.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Agung Laksmono, juga memberikan pandangannya terhadap pentingnya penguatan perlindungan perempuan dan anak. Ia menilai bahwa sebagian besar kekerasan yang terjadi bersifat kultural, sehingga penanganannya tidak cukup dengan pendekatan hukum saja. Perlu strategi yang lebih mendalam, yaitu melalui edukasi, penyadaran, dan perubahan perilaku sosial di tingkat masyarakat.

"Kekerasan ini kan lebih bersifat kultural, yang seringkali tidak disadari oleh pelakunya maupun korbannya. Kalau kita hanya mengandalkan hukum, hasilnya akan sangat terbatas. Jadi penanganannya lebih ke penyadaran agar membentuk pola pikir dan perilaku yang lebih positif," tegas Agung.

Ia juga mengajak Satgas PPA untuk terus menjadi agen perubahan di masyarakat dan menegaskan bahwa DPRD akan berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mendukung penguatan kerja-kerja perlindungan ini.

Dalam sesi penutup, kembali Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul menyampaikan apresiasi atas seluruh kerja keras dan dedikasi Satgas PPA. Ia mengatakan bahwa DPRD akan selalu terbuka untuk menjalin komunikasi dan menerima audiensi dari Satgas PPA kapan pun dibutuhkan. Ia juga berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Bantul sebagai Kabupaten Ramah Anak.

"DPRD Bantul sangat mengapresiasi semua kegiatan yang dilakukan oleh Satgas PPA. Kami juga akan selalu memberikan support karena kehadiran Satgas PPA ini dapat menunjang program dari Pemkab Bantul," tuturnya.

Audiensi ditutup dengan suasana penuh optimisme. Para peserta, baik dari legislatif maupun Satgas, menyadari bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah pekerjaan jangka panjang yang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kemitraan yang kuat, komitmen yang berkelanjutan, serta kepercayaan yang tumbuh dari proses dialog dan kerja bersama.

Pertemuan tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan upaya perlindungan sosial di Kabupaten Bantul. Tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai langkah konkret membangun sinergi yang lebih kokoh. Dengan komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang solid, harapan menjadikan Bantul sebagai Kabupaten Ramah Anak bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

Komisi B DPRD Kabupaten Bantul *Terima Audiensi* dari BADAN PENGURUS CABANG HIPMI KABUPATEN BANTUL



Rabu, 6 Agustus 2025 14:51 WIB

Komisi B DPRD Kabupaten Bantul telah menggelar audiensi Bersama Badan Pengurus Cabang HIPMI Kabupaten Bantul pada Selasa (29/07) lalu. Audiensi ini bertujuan untuk menjalin kolaborasi dengan DPRD Bantul. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi B dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Arif Haryanto, S.Si., didampingi wakil ketua, Edy Prabowo, S.E., beserta anggota Komisi B, Heru Sudibyo, S.Sos MM., Salsha Aurelia Daninsky, S.H., dan Jumirin. Dari pihak HIPMI, hadir jajaran pengurus serta perwakilan anggota yang membawa semangat kolaborasi dan gagasan untuk kemajuan perekonomian daerah. Acara diawali dengan pemaparan visi, misi, dan program kerja HIPMI Bantul oleh Aryo Mahendra selaku perwakilan pengurus. Dalam pemaparannya, Aryo menyampaikan komitmen HIPMI untuk terus mendorong lahirnya wirausaha muda, meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan DPRD.

Tanggapan pertama disampaikan oleh perwakilan Dinas Nakertrans Kabupaten Bantul, Mujahid Amruddin, yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif HIPMI dalam memperkuat peran pemuda di dunia usaha. Ia menyoroti fenomena tingginya tingkat keluar-masuk tenaga kerja muda di perusahaan-perusahaan yang menjadi tantangan tersendiri. *"Kami kerap menerima keluhan dari perusahaan mengenai banyaknya pemuda yang bekerja hanya sebentar, lalu keluar, istilahnya 'jelehan'. Fenomena ini menarik untuk didiskusikan bersama HIPMI agar kita dapat memberi motivasi dan pendampingan, sehingga pemuda Bantul bisa lebih siap menyesuaikan diri di dunia kerja,"* ungkapnya.

Mujahid menambahkan bahwa Nakertrans memiliki tiga bidang yang selaras dengan program HIPMI, khususnya bidang pelatihan dan produktivitas. Pada tahun 2025, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan 64 UMKM untuk mengukur produktivitas sekaligus mengadakan



pelatihan. Selain itu, Nakertrans juga bekerja sama dengan lima LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) di Bantul untuk menyelenggarakan pelatihan digital marketing, menjahit, pelatihan barista, dan juga satpam. Melalui Balai Latihan Kerja (BLK), mereka juga menyiapkan program sertifikasi kompetensi yang diharapkan dapat melahirkan wirausahawan baru.



Dukungan juga datang dari Tutik, perwakilan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Ia menyebutkan bahwa misi dinas adalah mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal melalui investasi yang mampu meningkatkan nilai tambah. Tutik menjelaskan bahwa ada sejumlah bidang yang bisa dikolaborasikan bersama HIPMI. Pada bidang koperasi, misalnya, dinas berfokus pada pendirian, pembinaan, serta peningkatan kualitas koperasi agar mampu berperan lebih besar dalam perekonomian lokal. Di bidang industri, program yang dijalankan mencakup fasilitasi sertifikasi halal dan berbagai bentuk pendampingan lain yang dibutuhkan pelaku industri kecil dan menengah. Selain itu, pada bidang usaha mikro, dinas berupaya menumbuhkan serta memperkuat kapasitas UMKM melalui berbagai program pemberdayaan. Sementara di bidang pengembangan perdagangan, terdapat kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pemasaran produk, penguatan kemitraan, serta penyelenggaraan bootcamp yang ditujukan untuk memperluas jaringan dan pengetahuan pelaku usaha. Tak kalah penting, bidang sarana perdagangan juga menjadi perhatian dengan program-program peningkatan kualitas perdagangan.

Edy Prabowo menilai ada beberapa program HIPMI yang beririsan dengan program pemerintah daerah. Namun, ia menyoroti adanya kendala regulasi yang membatasi OPD dalam memberikan bantuan langsung berupa dana kepada pengusaha.

Sementara itu, anggota Komisi B Salsha Aurelia Daninsky menekankan pentingnya optimalisasi anggaran DPRD yang dapat diarahkan untuk program pelatihan.



"Yang paling memungkinkan untuk bisa dikolaborasikan dengan HIPMI yaitu kami memiliki anggaran setiap tahunnya. Kami Mengalokasikan anggarannya ke pelatihan dan pelatihan tersebut harus mengikuti buku pokir. Saya melihat satu ide untuk program pokir, yaitu pelatihan pendampingan pelaku usaha. Misalnya melalui digitalisasi. Dengan begitu, anggaran dewan dapat bersinergi dengan program HIPMI." Ujarnya.

Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama lintas sektor dalam membangun ekonomi lokal di Kabupaten Bantul. Melalui kolaborasi antara HIPMI, DPRD, serta perangkat daerah, diharapkan lahir berbagai program nyata yang tidak hanya meningkatkan kapasitas wirausaha muda, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bantul. (RRA)





Komisi C dan Komisi D DPRD Kabupaten Bantul Terima Audiensi dari Badan Pengurus HIPMI Kabupaten Bantul

BANTUL - DPRD Kabupaten Bantul kembali menggelar audiensi dengan Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bantul pada Senin (08/09/2025). Pertemuan berlangsung di ruang rapat Komisi C DPRD Kabupaten Bantul. Audiensi diterima oleh Ketua Komisi D DPRD Bantul, Pramu Diananto Indratriatmo, dan Ketua Komisi C, Dwi Kristiantoro, S.T., bersama anggota Komisi C dan D lainnya. Audiensi ini juga dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antara lain Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP), serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bantul. Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari permohonan HIPMI Kabupaten Bantul yang ingin mempererat sinergi dengan DPRD Kabupaten Bantul, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan aset daerah,

pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. HIPMI menyampaikan tiga tujuan utama, yaitu: menyelaraskan program kerja dengan fungsi Komisi C dan D DPRD, menjalin kerja sama strategis untuk percepatan pembangunan ekonomi, serta membuka peluang kolaborasi antara legislatif dan pengusaha muda dalam pembangunan sumber daya manusia di Bantul.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi D mengapresiasi langkah HIPMI Kabupaten Bantul yang aktif menjalin komunikasi dengan DPRD dan perangkat daerah *"Program ini sangat relevan untuk mendorong perkembangan, khususnya di bidang ekonomi. Kami tentu siap mendukung dengan bekerja sama bersama dinas terkait, Dengan kerja sama yang kuat, kita bisa menciptakan program yang benar-benar bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat"* ungkapnya.

Perwakilan BPC HIPMI Bantul kemudian memaparkan program kerja yang sejalan dengan ruang lingkup

Komisi C dan Komisi D. Beberapa fokus utama yang disampaikan antara lain upaya menjalin kerja sama strategis dalam percepatan pembangunan ekonomi, pengelolaan aset daerah yang berkelanjutan, penguatan peran pengusaha muda dalam pembangunan sumber daya manusia, hingga penjajakan peluang kolaborasi antara sektor legislatif dan pelaku usaha muda di Bantul.



Dwi Kristiantoro, ST, menekankan pentingnya kemudahan dalam urusan perizinan.

"Proses perizinan harus dibuat lebih ringkas dan efisien. Dengan begitu, pengusaha muda tidak terhambat dalam mengembangkan usahanya, tentu dengan tetap ada pendampingan dari dinas terkait. Jika regulasi terlalu berbelit, justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal," ujar Dwi.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan DKUKMPP, Tutik Lestariningsih, S.P.M.Ec.Dev menyoroti pentingnya penguatan UMKM dan pemanfaatan ruang usaha bersama.

"Kami berharap audiensi ini dapat mendorong kerja sama dalam pemanfaatan ruang usaha dan pengembangan pasar rakyat. UMKM adalah penggerak utama ekonomi daerah, sehingga pemberdayaan mereka harus menjadi prioritas," ungkap Tutik.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Fenty Yusdayati, MT., mendorong HIPMI untuk membimbing

pengusaha muda agar lebih siap menghadapi tantangan pasar modern. Bagian Kesra Setda, menekankan perlunya memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam setiap program kerja sama. Dinas teknis lainnya juga menambahkan bahwa HIPMI perlu terus memperbarui informasi penawaran melalui e-katalog, sehingga kerja sama di bidang infrastruktur dapat berjalan secara berkelanjutan untuk mendukung aktivitas ekonomi jangka panjang.

Anggota Komisi D DPRD Bantul, Drs. Ahmad Agus Sofwan, M.Pd.I, menekankan pentingnya data yang akurat dan selalu diperbarui dalam pengembangan bisnis pengusaha muda.

"Program yang tepat sasaran hanya bisa lahir dari basis data yang relevan. Selain itu, setiap pelatihan harus disertai tindak lanjut agar keterampilan yang diperoleh masyarakat benar-benar dapat diterapkan secara berkelanjutan," ujar Agus Sofwan.

Audiensi ini ditutup dengan komitmen BPC HIPMI Bantul untuk terus memperbarui data informasi yang dimiliki serta menjalin kerja sama dengan dinas-dinas terkait. Melalui sinergi antara DPRD, HIPMI, dan OPD diharapkan lahir program-program nyata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul. (MK)(MFF)



Terima Audiensi PABSI Bantul, Komisi D DPRD Bantul Tegaskan Komitmennya Dukung Pembinaan Olahraga



BANTUL - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembinaan olahraga. Hal ini disampaikan dalam kegiatan audiensi bersama Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) Bantul yang digelar pada Kamis (2/10/2025) di ruang rapat Komisi D DPRD Bantul.

Audiensi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Bantul, Drs. H. Ahmad Agus Sofwan, M.Pd.I., dan dihadiri perwakilan dari Bidang Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Bantul serta pengurus KONI Bantul. Dari unsur legislatif, hadir pula anggota Komisi D DPRD Bantul yaitu Drs. Sapto Priyono, M.M., Agustinus Sulistyodjati, S.Psi., dan Yessy Yusnita, S.E.

Dalam paparannya, perwakilan PABSI Bantul, Sujarwo, mengungkapkan bahwa meskipun jumlah atlet angkat besi di Bantul terus bertambah dan event olahraga semakin ramai, peralatan latihan yang ada sudah banyak yang rusak dan tidak layak pakai.

"Jumlah atlet semakin banyak, tetapi fasilitas yang kami miliki tidak memadai. Ini tentu mengkhawatirkan untuk keberlangsungan pembinaan," ungkap Sujarwo.

Selain itu, dana operasional yang diterima PABSI juga sangat terbatas, yakni hanya sekitar Rp9 juta per tahun. Menurut Sujarwo, kondisi ini membuat pelatih dan pengurus sering kali harus menutup kebutuhan dengan iuran pribadi.

Menanggapi hal tersebut, Giyanto, Ketua Harian KONI Bantul, menyampaikan bahwa permasalahan sarana dan prasarana tidak hanya dialami PABSI, tetapi juga banyak cabang olahraga lain. Dari total 49 cabang olahraga yang dibina KONI Bantul, sebagian besar masih menghadapi keterbatasan fasilitas latihan.

Sementara itu, Nur Wicaksono, Kabid Organisasi KONI Bantul, menambahkan bahwa meski dengan segala keterbatasan, prestasi atlet Bantul tetap membanggakan.



"Dalam PORDA, 90 persen atlet yang dikirim adalah asli putra daerah Bantul. Mereka butuh dukungan agar tidak pindah ke kota lain demi fasilitas yang lebih baik," jelasnya.

Dari pihak pemerintah daerah, Iin Junarsih, M.Pd., mewakili Bidang Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Bantul, menjelaskan bahwa pihaknya tahun ini telah mengalokasikan anggaran sesuai dengan usulan KONI. Khusus cabang olahraga angkat besi, akan ada bantuan senilai Rp13 juta untuk pembelian peralatan baru.



"Rencana ini akan segera dibahas dalam rapat berikutnya, sehingga PABSI bisa segera mendapatkan dukungan perlengkapan latihan," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Bantul, Ahmad Agus Sofwan, menyampaikan apresiasi atas semangat PABSI dalam membina atlet meski dengan berbagai keterbatasan. Ia menegaskan bahwa Komisi D akan selalu memperjuangkan kepentingan olahraga di Kabupaten Bantul.

"Kami pasti akan memperjuangkan aspirasi dari cabang olahraga, termasuk PABSI. Ke depan, Komisi D juga akan mengagendakan kunjungan langsung ke berbagai cabang olahraga untuk melihat kondisi di lapangan," tegasnya.

Anggota Komisi D, Drs. Sapto Priyono, M.M., juga menambahkan bahwa aspirasi dari organisasi olahraga akan diteruskan kepada eksekutif agar segera mendapat perhatian.

"Harapannya fasilitas dan kesejahteraan atlet bisa ditingkatkan, sehingga prestasi olahraga Bantul semakin maju," ujarnya.

Audiensi ditutup dengan pesan optimis dari Komisi D DPRD Bantul yang berharap agar atlet-atlet Bantul, termasuk cabang angkat besi, bisa segera menikmati fasilitas yang layak. Dengan begitu, mereka dapat terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah.

"Kami ingin atlet Bantul tetap bertahan membela daerah asalnya. Dengan fasilitas dan dukungan yang baik, mereka bisa terus berjuang membawa prestasi untuk Bantul," pungkas Ahmad Agus Sofwan.

Pertemuan ini menjadi bukti nyata adanya sinergi antara DPRD, KONI, pemerintah daerah, dan organisasi olahraga dalam memperjuangkan masa depan olahraga Bantul. Komitmen kuat dari Komisi D DPRD Bantul diharapkan mampu menjadi pendorong peningkatan prestasi atlet hingga ke tingkat nasional maupun internasional.



Harmoni Perayaan **HUT ke-80 RI** Bersama **DPRD Bantul**



BANTUL - Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bantul berlangsung dalam nuansa penuh kebersamaan dan penghormatan. DPRD Kabupaten Bantul hadir secara aktif dalam berbagai kegiatan yang digelar pada Jumat-Minggu (15-17/08/2025), mulai dari dialog kebangsaan, seremoni kenegaraan, hingga penghormatan kepada para pahlawan bangsa.

Rangkaian peringatan ini dimaknai sebagai sebuah harmoni: menyatukan semangat refleksi, kebanggaan, dan doa untuk masa depan bangsa. Acara dibuka dengan Talkshow Forkopimda Kabupaten Bantul bertema "Pembangunan Kabupaten Bantul Lima Tahun Mendatang", sebuah forum dialog yang menghadirkan pandangan strategis mengenai arah pembangunan daerah.

Nuansa khidmat hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa yang diisi dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI, sebuah momen reflektif yang bukan hanya mengingatkan pada perjalanan panjang bangsa dalam menjaga demokrasi, tetapi juga menegaskan capaian sekaligus arah pembangunan nasional ke depan.

Momentum refleksi diawali dengan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan, sebuah upacara hening untuk mengenang jasa para pahlawan. Keesokan harinya, pada puncak peringatan, Ketua DPRD Bantul membacakan Teks Proklamasi dalam Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI, menegaskan bahwa semangat kemerdekaan akan senantiasa hidup lintas generasi. Usai upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan sebagai wujud penghormatan dan rasa terima kasih kepada para pahlawan bangsa.

Melalui rangkaian kegiatan ini, DPRD Kabupaten Bantul menegaskan komitmennya untuk hadir bersama masyarakat, merayakan kemerdekaan, sekaligus menjaga nilai-nilai kebangsaan. Kebersamaan yang terjalin antara legislatif dan eksekutif dalam setiap momen peringatan juga menunjukkan sinergi yang kuat dalam membangun daerah. Harmoni inilah yang menjadi energi kolektif untuk menatap Bantul yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Gardu Projotamansari

Menyulam Harapan Kabupaten Bantul Lima Tahun ke Depan

BANTUL - Suasana pagi di halaman Kantor DPRD Kabupaten Bantul, Jumat (15/08/2025), tampak berbeda, lebih hangat dan sarat antusiasme. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan RI, DPRD Bantul menggelar Dialog Interaktif GARDU PROJOTAMANSARI, sebuah forum penting yang membuka ruang pembahasan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Acara ini disiarkan langsung oleh JogjaTV, sehingga masyarakat dapat menyimak secara luas jalannya dialog.

Dalam forum ini, hadir tokoh-tokoh utama pemerintahan Kabupaten Bantul yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda): Ketua DPRD Bantul, H. Hanung Raharjo, ST.; Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih; Wakil Bupati Bantul, H.

Aris Suharyanta, S.Sos., M.M.; Dandim 0729 Bantul, Letkol Inf. Muhidin, S.H., M.I.P.; Kajari Bantul, Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.H.; dan Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana, S.Sn.

Turut hadir pula Wakil Ketua, anggota DPRD Bantul serta Sekretaris Daerah bersama jajaran OPD. Kehadiran mereka menegaskan betapa pentingnya momen dialog ini bagi keseluruhan struktur pemerintahan daerah. Tema yang diangkat, "Pembangunan Kabupaten Bantul Lima Tahun Mendatang", menjadi fokus utama. Forum ini diarahkan pada penjabaran Prioritas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta 13 Program Unggulan yang diproyeksikan sebagai motor penggerak transformasi daerah.





Ketua DPRD Bantul: DPRD Bantul Tegaskan Komitmen Kawal Aspirasi dan Pemerataan Pembangunan

Sebagai pimpinan legislatif, Hanung menggarisbawahi bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan arah pembangunan lima tahun ke depan tidak hanya sekadar program di atas kertas. Menurutnya, masyarakat menaruh harapan besar kepada DPRD agar benar-benar menjadi pengawal aspirasi rakyat. Karena itu, proses perencanaan hingga penganggaran harus disusun secara transparan, terbuka, dan melibatkan banyak pihak.

Hanung juga menyinggung soal pemerataan pembangunan. Ia menilai masih ada wilayah Bantul yang belum sepenuhnya tersentuh hasil pembangunan, baik dari segi infrastruktur maupun layanan publik. Dengan perencanaan yang matang, ia optimistis lima tahun ke depan bisa menjadi momentum untuk mengurangi ketimpangan.

Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang lebih intens dengan eksekutif, Forkopimda, serta masyarakat sipil. Menurutnya, semua pihak harus diberi ruang untuk menyampaikan masukan agar pembangunan benar-benar terarah pada kebutuhan nyata.

"DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan yang berkeadilan, berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta tetap memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan aspirasi masyarakat Bantul," tegas Hanung.



Bupati Bantul : Bantul Lima Tahun ke Depan, Maju Tanpa Tinggalkan Akar Budaya

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menegaskan bahwa pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan tidak boleh berjalan setengah hati. Ia menitikberatkan pada perlunya transformasi di segala bidang agar Bantul mampu bersaing sekaligus tetap menjaga identitasnya. Menurut Halim, tantangan pembangunan semakin kompleks sehingga dibutuhkan arah kebijakan yang terintegrasi, jelas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam paparannya, Halim menyebutkan bahwa 13 program unggulan yang telah ditetapkan akan menjadi motor penggerak utama pembangunan daerah. Program tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, penguatan UMKM, hingga pelayanan publik berbasis digital. Ia menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan fisik semata, tetapi juga menyentuh aspek nonfisik yang berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Lebih jauh, Halim menekankan bahwa pembangunan manusia harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur. Kualitas sumber daya manusia, menurutnya, adalah fondasi utama agar transformasi Bantul benar-benar terasa di masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan komitmen untuk tetap menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas daerah.

"Kita telah menetapkan impian bersama bahwa Bantul harus maju, kuat, demokratis, dan sejahtera, dengan tetap dibingkai oleh nilai keberagamaan serta budaya istimewa yang mampu mengikat seluruh tujuan kita. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan transformasi menyeluruh, meliputi transformasi sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, ekonomi, pengembangan infrastruktur kewilayahan, serta sosial budaya," ujar Halim.



Wabup Bantul: Tancap Gas Wujudkan Visi-Misi Pembangunan 2026-2030

Wakil Bupati Bantul, H. Aris Suharyanta, S.Sos., M.M., menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati berjalan sesuai rencana. Ia menekankan bahwa koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) akan diperkuat agar program-program unggulan dapat terlaksana dengan baik. *"Selaku Wakil Bupati, ketugasan kami adalah memastikan seluruh program visi misi Bupati ini berjalan, sehingga kami banyak akan koordinasi dengan OPD,"* ujarnya.

Program prioritas yang menjadi perhatian di periode mendatang antara lain pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi. Salah satu fokus yang ditekankan adalah pembangunan jalan di seluruh wilayah Bantul. Wabup menyampaikan bahwa Bupati memiliki mimpi besar membangun jalan sepanjang 600 km. *"Pak Bupati punya mimpi, sehingga Wakil Bupati memastikan saya menjaga tidurnya Pak Bupati biar mimpinya panjang. Jadi kita akan membangun jalan di Kabupaten Bantul ini,"* ungkapnya dengan semangat.

Meskipun di tahun anggaran 2025 Bantul tidak mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, Wabup memastikan hal itu tidak menjadi penghalang. Program pembangunan tetap akan diupayakan agar sejalan dengan visi-misi lima tahun ke depan. Ia menyebut, banyak kegiatan yang sudah berjalan di tahun 2025 ternyata bisa bersinergi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2026-2030.



Dandim 0729 Bantul: Siap Dukung Penuh Program Unggulan Daerah

Komitmen untuk memperkuat sinergi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Bantul kembali ditegaskan oleh Komandan Kodim 0729 Bantul, Letkol Inf. Muhidin, S.H., M.I.P. Ia menekankan bahwa seluruh program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, terutama dalam bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM), akan didukung penuh oleh jajaran Kodim Bantul.

"Program unggulan saya meningkatkan generasi penerus bangsa. Alhamdulillah kemarin kita meraih predikat terbaik seluruh Indonesia, bahwa di Bantul bisa mencetak prajurit 124 satu angkatan," ujarnya.

Upaya pembinaan generasi muda terus dilakukan melalui berbagai program, mulai dari pendampingan Paskibra, hingga pembinaan olahraga. Muhidin juga menekankan pentingnya menjauhkan remaja dari narkoba dan kenakalan remaja dengan kegiatan positif.

Tak hanya di bidang SDM, Kodim Bantul juga siap memperkuat kerja sama dengan seluruh OPD dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu yang sudah berjalan adalah kerja sama dengan Kejaksaan Negeri melalui nota kesepahaman, serta sinergi dengan Dinas Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan. Upaya menjaga stabilitas harga gabah dan beras pun terus dilakukan agar petani sejahtera sekaligus harga di pasaran tetap terkendali.

Selain itu, Dandim 0729 Bantul menyoroti program TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa sebagai wujud dukungan TNI terhadap pembangunan infrastruktur dan budaya gotong royong. Ia menegaskan, karakter masyarakat Bantul yang menjunjung tinggi budaya menjadi kekuatan tersendiri. *"Apabila kecamatan atau desa memerlukan gotong royong, kita siap mendukung dari sisi tata kelola,"* tegas Muhidin.



Kajari Bantul: Dorong Penegakan Hukum Humanis dan Pendampingan Desa

Mengakhiri rangkaian pandangan, Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, M.H., menegaskan komitmennya untuk menghadirkan wajah kejaksaan yang lebih humanis, transparan, dan dekat dengan masyarakat. Dalam Dialog Interaktif Gardu Projotamansari, ia menyebut bahwa penegakan hukum bukan hanya soal penindakan, tetapi juga pencegahan yang harus berjalan seimbang.

Menurut Kristanti, Kejaksaan siap mendukung visi pembangunan Kabupaten Bantul, baik di bidang peningkatan kualitas SDM maupun infrastruktur. Ia mencontohkan program Jaksa Masuk Sekolah yang terus digalakkan untuk meningkatkan literasi hukum sejak dini, termasuk rencana kerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk menghadirkan perpustakaan digital yang bisa diakses pelajar.

"Gadget anak-anak jangan hanya untuk main game, tapi juga untuk membaca dan belajar," ujarnya.

Selain di bidang pendidikan, Kejaksaan juga berperan dalam mengawal pembangunan infrastruktur dan program prioritas daerah. Kristanti menegaskan pihaknya rutin melakukan pendampingan hukum bagi OPD, agar proyek-proyek pemerintah berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Tidak hanya itu, Kejaksaan juga tengah menyiapkan kerja sama dengan seluruh kelurahan untuk memberikan pendampingan hukum dalam pengelolaan dana desa, khususnya alokasi 20 persen untuk program ketahanan pangan.

Kristanti menutup dengan penekanan bahwa Kejaksaan ingin hadir sebagai mitra masyarakat, bukan sekadar aparat penuntut.

"Kami berkomitmen melakukan game changer, mengubah wajah kejaksaan yang tadinya menyeramkan dari sisi penindakan, menjadi wajah pencegahan. Kami siap hadir di tengah masyarakat, memberikan konsultasi, bantuan hukum, hingga pendampingan agar pembangunan di Bantul berjalan bersih dan berkeadilan," tegasnya.



Kasi Humas Polres Bantul: Kawal Pembangunan dan Jaga Nama Baik Daerah

Dalam Dialog Interaktif Gardu Projotamansari, Kasi Humas Polres Bantul menegaskan bahwa jajaran kepolisian siap menjadi bagian dari garda pendukung pembangunan di Kabupaten Bantul. Menurutnya, pengamanan tidak hanya soal menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan program pemerintah dapat berjalan sesuai harapan.

Ia menjelaskan, Polres Bantul menerapkan tiga pendekatan utama dalam menjaga keamanan, yakni upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya edukasi kepada masyarakat terus digalakkan, terutama terkait keselamatan berkendara yang masih menjadi perhatian serius di Bantul.

"Kami tidak bosan-bosannya mengedukasi, baik di sekolah mulai dari TK, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, maupun melalui media massa dan media sosial," ucapnya.

Selain itu, Polres Bantul juga menaruh perhatian pada ketahanan pangan, bekerja sama dengan TNI dalam mendukung distribusi hasil pertanian mulai dari padi hingga jagung. Menurut Jeffry, stabilitas pangan merupakan bagian penting dari pembangunan yang tidak boleh diabaikan. *"Itu memang tugas tambahan, tapi menjadi prioritas kami karena sekarang isu pangan adalah hal yang diutamakan,"* jelasnya.

Di akhir penyampaian, AKP Jeffry menggarisbawahi pentingnya sinergi masyarakat dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan marwah Bantul.

"Program-program pemerintah bukan hal yang tidak mungkin tercapai. Akan lebih mudah jika ada kerja sama, sinergi, dan kepercayaan masyarakat. Intinya, kita bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjaga nama baik Bantul. Jangan sampai yang viral itu justru hal-hal yang merugikan," tegasnya.



DPRD KABUPATEN BANTUL Gelar Rapat Paripurna MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO

BANTUL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan secara langsung Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Jumat (15/8/2025). Rapat ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bantul dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo, serta dihadiri oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Wakil Bupati Joko B Purnomo, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Panewu, Kapolsek, dan Danramil se-Kabupaten Bantul. Hadirnya berbagai unsur pimpinan daerah tersebut menandai pentingnya momentum pidato kenegaraan sebagai arah bersama dalam menjalankan pembangunan di tingkat lokal.

Pidato Kenegaraan Jadi Pijakan Pembangunan Daerah

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo menegaskan bahwa pidato kenegaraan Presiden bukan hanya seremonial tahunan, melainkan

menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah. Menurutnya, banyak poin penting dalam pidato Presiden Prabowo Subianto yang relevan dengan agenda pembangunan di Kabupaten Bantul, mulai dari penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pemantapan pertahanan nasional yang berhubungan erat dengan stabilitas di daerah.

"Pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden menjadi pijakan strategis bagi kita di daerah untuk merumuskan prioritas pembangunan yang sinergis, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Bantul," ungkap Hanung. Ia juga menekankan bahwa arah kebijakan nasional yang disampaikan Presiden akan menjadi rujukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

Sinergi DPRD dan Pemkab untuk Pembangunan Inklusif

Lebih lanjut, Hanung menyampaikan bahwa DPRD Bantul bersama Pemerintah Kabupaten Bantul

berkomitmen memperkuat sinergi untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Hal itu sejalan dengan semangat kebangsaan yang ditekankan Presiden dalam pidatonya, yakni agar pembangunan nasional tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat.

"DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan yang berkeadilan, berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta tetap memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan aspirasi masyarakat Bantul," tegas Hanung.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih yang turut hadir dalam rapat paripurna menekankan bahwa pidato kenegaraan Presiden memiliki arti penting dalam mengarahkan langkah pembangunan daerah. Menurutnya, Bantul lima tahun ke depan membutuhkan transformasi di berbagai bidang agar mampu bersaing di tengah tantangan global, namun transformasi tersebut tidak boleh lepas dari akar keberagaman yang menjadi identitas masyarakat Bantul.

Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan nasional yang disampaikan Presiden sejalan dengan visi Bantul yang

berupaya menghadirkan pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga. Transformasi yang dilakukan mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan publik, dengan tetap menjunjung tinggi nilai keberagaman dan budaya lokal sebagai fondasi utama.

Suasana Khidmat dan Penuh Perhatian

Acara rapat paripurna berlangsung dengan suasana khidmat. Para peserta mengikuti jalannya pidato dengan seksama melalui siaran langsung dari Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Para undangan tampak serius mencatat dan menyimak setiap poin yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, menandakan besarnya perhatian terhadap arah kebijakan pemerintah pusat yang akan memengaruhi dinamika pembangunan daerah.

Rangkaian acara ditutup dengan doa bersama sebagai ungkapan syukur atas perjalanan bangsa selama 80 tahun merdeka, sekaligus harapan agar Kabupaten Bantul mampu berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.





KETUA DPRD BANTUL HADIRI UPACARA APEL KEHORMATAN DAN RENUNGAN SUCI DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar pada Minggu (17/8/2025) tepat pukul 00.00 WIB di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa Bantul. Acara berlangsung khidmat, di mana seluruh lampu dimatikan dan hanya cahaya obor serta sinar purnama yang menerangi prosesi suci tersebut. Suasana hening semakin menegaskan makna penghormatan kepada para pahlawan yang telah beristirahat di TMP.

Kehadiran Ketua DPRD Bantul Bersama Forkopimda

Upacara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo, S.T., beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hadir pula perwakilan TNI, Polri, Satpol PP, serta para veteran Bantul yang pernah ikut langsung dalam perjuangan mempertahankan tanah air. Kehadiran mereka memperkuat makna acara, bahwa penghormatan kepada arwah pahlawan adalah tanggung jawab bersama lintas generasi dan profesi.

Bagi para veteran, momen ini menjadi ajang mengenang sekaligus menyampaikan pesan moral pada generasi penerus. Sedangkan bagi para pejabat

daerah, acara ini adalah wujud komitmen untuk menjaga persatuan serta melanjutkan cita-cita perjuangan melalui pembangunan daerah. Perpaduan antara tokoh pemerintahan, aparat, dan veteran menciptakan sebuah ikatan emosional yang sarat nilai historis.

Agenda Tahunan yang Sarat Makna

Renungan suci ini merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Bantul. Upacara tahunan ini selalu digelar di malam menjelang 17 Agustus, sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan yang telah gugur di medan juang. Dengan tata upacara yang sederhana namun penuh makna, seluruh peserta diajak menyelami kembali nilai-nilai pengorbanan dan persatuan.

Tradisi ini juga menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan mudah. Ada darah, keringat, dan air mata yang tertumpah agar bangsa ini bisa berdiri tegak hingga kini. Melalui renungan malam, generasi sekarang diingatkan bahwa menjaga kemerdekaan adalah kewajiban yang tak boleh luntur meski zaman terus berganti.



Kata Penghormatan dan Doa untuk Para Pahlawan

Dalam upacara tersebut, kata-kata penghormatan dan doa dipanjatkan kepada para pahlawan yang gugur demi bangsa. Ketua DPRD Bantul menegaskan bahwa semangat juang para pahlawan harus menjadi teladan bagi generasi sekarang dan mendatang.

"Delapan puluh tahun lalu, para pejuang mengorbankan segalanya agar kita dapat merasakan merdeka. Semangat juang dan pengorbanan mereka harus terus kita warisi. Dengan semangat itu, kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan dengan bekerja keras, berkarya nyata, serta memberikan yang terbaik bagi masyarakat Bantul dan bangsa Indonesia," ujar Hanung Raharjo dengan penuh rasa hormat.

Warisan Semangat Juang untuk Generasi Penerus

Upacara renungan suci di TMP Kusuma Bangsa ini menegaskan bahwa semangat para pahlawan tidak boleh berhenti hanya sebagai cerita sejarah. Ia harus dihidupkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan zaman, generasi Bantul ditantang untuk melanjutkan api perjuangan melalui kerja nyata: membangun daerah dengan ilmu, menjaga persatuan dengan sikap toleran, serta menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan. Seperti para pahlawan yang rela berkorban demi bangsa, masyarakat Bantul kini dipanggil untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing. Dengan begitu, cita-cita perjuangan tidak hanya dikenang, tetapi juga diwujudkan dalam langkah-langkah kemajuan yang nyata.



Ketua DPRD Bantul Bacakan Teks Proklamasi pada Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI



BANTUL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul kembali mengambil bagian penting dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada upacara bendera yang digelar di Lapangan Trirenggo, Bantul, Minggu (17/8/2025), Ketua DPRD Kabupaten Bantul, H. Hanung Raharjo, S.T., mendapat kehormatan untuk membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Upacara Penuh Khidmat

Upacara peringatan yang dimulai sejak pagi berlangsung dengan khidmat dan penuh makna. Sejak peserta memasuki lapangan, suasana nasionalisme dan kebersamaan begitu terasa. Rangkaian kegiatan diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bupati dan Wakil Bupati, anggota DPRD, jajaran TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, hingga organisasi kemasyarakatan.

Kehadiran seluruh elemen masyarakat ini menjadi simbol bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum untuk mempererat persatuan dan meneguhkan kembali semangat kebangsaan.

Proklamasi yang Menggugah Nasionalisme

Pembacaan teks Proklamasi oleh Ketua DPRD menjadi momen puncak yang ditunggu-tunggu. Dengan suara lantang dan penuh semangat, Hanung Raharjo membacakan setiap kata dalam teks Proklamasi yang pertama kali dikumandangkan Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1945.

Lantunan itu menggema di Lapangan Trirenggo, menggetarkan hati dan menggugah jiwa nasionalisme seluruh peserta yang hadir. Suasana hening menyelimuti, seolah membawa semua orang kembali pada memori sejarah perjuangan bangsa dan pengorbanan para pahlawan.

Usai pembacaan teks Proklamasi, Ketua DPRD Bantul menegaskan pentingnya momentum kemerdekaan untuk memperkuat komitmen membangun daerah.

"Hari kemerdekaan bukan hanya perayaan, tetapi juga pengingat bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa. DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan yang berkeadilan, berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta tetap memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan aspirasi masyarakat Bantul," ujar Hanung.



Pengibaran Sang Merah Putih

Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih, bertindak sebagai inspektur upacara. Prosesi pengibaran bendera merah putih dilakukan secara khidmat oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bantul yang telah menjalani latihan intensif.

Gerakan seragam dan disiplin yang diperlihatkan Paskibraka menjadi simbol semangat juang generasi muda dalam menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa.

Doa untuk Bangsa dan Daerah

Selain pengibaran bendera, upacara juga diisi dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan serta doa bersama demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Doa tersebut dipanjatkan agar semangat perjuangan yang diwariskan para pendiri bangsa tetap menyala dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Kabupaten Bantul.



Momentum Refleksi dan Persatuan

Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Bantul bukan hanya menjadi ajang mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga kesempatan untuk melakukan refleksi. Baik pemerintah daerah maupun masyarakat diharapkan mampu mengambil api semangat perjuangan untuk menghadapi tantangan zaman, memperkuat persatuan, dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan demi kesejahteraan rakyat Bantul.

Ketua DPRD Bantul *Hadiri Ziarah dan Tabur Bunga* Usai Upacara HUT ke-80 RI



BANTUL - Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bantul berlangsung khidmat dan penuh makna. Seusai pelaksanaan Upacara Bendera di Lapangan Trirenggo pada Minggu (17/8/2025), jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bantul menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa Bantul.

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bantul, Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.H., dan diikuti oleh jajaran Forkopimda, di antaranya Ketua DPRD Bantul H. Hanung Raharjo, S.T., Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih, Wakil Bupati Bantul H. Aris Suharyanta, S.Sos., M.M., Kapolres Bantul AKBP Novita Eka Sari, Dandim 0729 Bantul Letkol Inf. Muhidin, S.H., M.I.P., serta Ketua Pengadilan Negeri Bantul. Kehadiran para pimpinan daerah ini menunjukkan kebersamaan dan komitmen untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah berkorban demi bangsa.

Prosesi Khidmat di Pusara Pahlawan

Ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta serta doa bersama yang dipimpin secara khidmat. Suasana hening terasa menyelimuti area TMP, memberi ruang bagi seluruh peserta untuk mengenang jasa mereka yang telah gugur.

Usai doa, rangkaian acara dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di pusara pahlawan. Ketua DPRD Bantul bersama jajaran Forkopimda menaburkan bunga satu per satu, sebagai simbol penghormatan dan rasa terima kasih atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Momentum Menghargai Jasa Pahlawan

Ketua DPRD Bantul H. Hanung Raharjo, S.T. menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat nyata akan besarnya jasa para pahlawan.

"Semangat perjuangan para pahlawan harus senantiasa menjadi teladan bagi kita semua, khususnya dalam mengabdikan diri untuk masyarakat Bantul dan bangsa Indonesia," ungkap Hanung.

Ia juga menambahkan bahwa penghormatan ini adalah bentuk syukur atas kemerdekaan yang telah diraih, sekaligus motivasi untuk terus menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, serta mengedepankan kepentingan rakyat.

Pengingat bagi Generasi Muda

Ziarah dan tabur bunga ini menjadi rangkaian penting dalam memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Kehadiran para pemimpin daerah diharapkan mampu memberi teladan bagi masyarakat, terutama generasi muda, agar senantiasa menghargai jasa para pahlawan. Dengan begitu, semangat perjuangan tidak hanya dikenang, tetapi juga dilanjutkan dalam bentuk kerja nyata membangun Bantul yang maju, sejahtera, aman, damai, berkelanjutan, serta tetap berakar pada budaya lokal.

Banggar DPRD Bantul Bahas Evaluasi Gubernur dan Perubahan APBD 2025



Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul menggelar rapat pada Senin (28/07) lalu, bertempat di Ruang Komisi A DPRD. Rapat ini menjadi bagian dari tahapan penting dalam proses penganggaran daerah, dengan dua agenda utama yang menjadi fokus pembahasan.

Agenda pertama yang dibahas adalah evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Evaluasi ini merupakan bentuk pengawasan dari Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten, guna memastikan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik.

Agenda kedua dalam rapat tersebut adalah penyusunan laporan pembahasan Badan Anggaran beserta saran dan pendapat terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme legislasi daerah sebelum ditetapkannya peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD.

Rapat dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul yang juga menjabat sebagai Ketua

Banggar, serta dihadiri oleh para anggota Banggar. Dari unsur eksekutif, hadir Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), serta perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Evaluasi Gubernur DIY terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses legal-formal yang harus dilalui setiap pemerintah daerah sebelum raperda ditetapkan menjadi peraturan daerah. Evaluasi ini menjadi acuan dalam menyempurnakan substansi dan penyajian dokumen pertanggungjawaban anggaran, sekaligus sebagai bahan masukan dalam perencanaan anggaran ke depan.

Selain itu, pembahasan terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi bagian yang tidak kalah penting. Perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk penyesuaian atas perkembangan dan dinamika pelaksanaan program daerah selama semester pertama tahun berjalan. Penyusunan perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan aktual di lapangan, sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk prioritas pembangunan.

Dalam rapat ini, Badan Anggaran mulai menyusun laporan yang akan berisi hasil pembahasan bersama



eksekutif, saran strategis, serta masukan terhadap struktur anggaran yang diusulkan dalam perubahan APBD. Laporan ini juga akan menjadi dokumen pendukung bagi DPRD dalam proses pengambilan keputusan pada tahap akhir.

Proses pembahasan perubahan APBD dilakukan dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyesuaian dalam anggaran diarahkan untuk mendukung pemenuhan pelayanan dasar, penguatan sektor strategis, serta penanganan berbagai isu prioritas yang berkembang di tengah masyarakat.

Rapat Banggar kali ini juga menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Bantul dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara transparan dan

akuntabel. Meskipun berlangsung secara internal dan teknis, tahapan ini memegang peranan vital dalam menjamin bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Setelah pembahasan selesai, seluruh masukan dan hasil diskusi akan dirangkum dalam laporan resmi Banggar. Laporan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPRD untuk disampaikan secara terbuka kepada seluruh anggota dewan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2025.

Seluruh tahapan ini mencerminkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan kebijakan anggaran. Koordinasi yang baik antar pihak diharapkan mampu menghasilkan kebijakan fiskal daerah yang lebih adaptif, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik.

Dengan terselenggaranya rapat Banggar ini, DPRD Kabupaten Bantul kembali menunjukkan peran aktifnya dalam menjamin pelaksanaan anggaran daerah yang efektif dan efisien. Ke depan, hasil akhir dari proses pembahasan ini diharapkan tidak hanya berupa dokumen formal, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul secara berkelanjutan.



RAPAT BADAN MUSYAWARAH: PENYUSUNAN JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DPRD BANTUL



Bantul, [30/01/2025] - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang bertujuan untuk menyusun jadwal kegiatan dan rapat DPRD Bantul. Rapat berlangsung di ruang rapat DPRD dan dihadiri oleh Wakil Ketua II dan III DPRD beserta jajaran anggota Bamus.

Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda penting direncanakan, termasuk jadwal rapat paripurna, rapat komisi, serta kegiatan kerja dewan yang bertujuan untuk memastikan kelancaran fungsi legislatif di Kabupaten Bantul. Wakil Ketua II DPRD Bantul menyampaikan bahwa penyusunan jadwal kegiatan ini merupakan



langkah strategis untuk menjaga efisiensi kerja dan memastikan semua program kerja DPRD dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Rapat Bamus ini juga membahas beberapa agenda prioritas yang akan menjadi perhatian utama DPRD dalam beberapa bulan mendatang. Keputusan hasil rapat tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, baik dalam aspek legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.

Acara rapat berjalan lancar dan diakhiri dengan kesepakatan terkait jadwal kegiatan DPRD yang akan segera diumumkan secara resmi. DPRD Bantul berharap jadwal yang telah disusun dapat mendukung pelaksanaan program kerja yang lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bantul.



Bapemperda DPRD Bantul *Gelar Rapat* **Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029**

Bapemperda DPRD Bantul Gelar Rapat Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029
Bantul - Rabu, 9 April 2025

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bantul menggelar rapat penting dalam rangka membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Rapat ini diselenggarakan pada Rabu, 9 April 2025 pada pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Bantul.

Pertemuan ini merupakan bagian dari tahapan strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan menjadi acuan selama lima tahun mendatang. Dalam rapat tersebut, hadir perwakilan dari berbagai instansi terkait, antara lain:

1. Pimpinan dan Anggota Bapemperda;
2. BPPD Kab. Bantul,
3. BPKPAD Kab. Bantul,
4. Inspektorat Daerah Kab. Bantul,
5. Diskominfo Kab. Bantul,
6. Bagian Hukum Setda Kab. Bantul dan,
7. Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul.



Pembahasan fokus pada penyesuaian arah kebijakan pembangunan yang akan dituangkan dalam RPJMD, termasuk evaluasi terhadap pencapaian program sebelumnya serta proyeksi kebutuhan pembangunan daerah ke depan. Selain itu, rapat juga menyoroti aspek legalitas dan tata kelola penyusunan RPJMD agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat berlangsung dengan lancar dan kondusif, ditandai dengan diskusi aktif dari para peserta guna menambah nilai penting pada rancangan awal RPJMD. Hasil dari pertemuan ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk proses konsultasi publik dan pembahasan lebih lanjut pada tahap berikutnya.

Penyusunan RPJMD 2025-2029 menjadi momentum strategis bagi Kabupaten Bantul untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang mampu menjawab tantangan dan peluang dalam lima tahun ke depan, sekaligus mengarahkan transformasi daerah menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. (Endah dan Alfida :2025)



Komisi DPRD Bantul Undang OPD untuk Bahas Penjajagan PPAS 2026



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul menggelar rangkaian rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja masing-masing komisi untuk membahas penjajagan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu (11-13/8) lalu, bertempat di ruang rapat masing-masing komisi DPRD Bantul. Rapat kerja ini menjadi langkah awal DPRD bersama eksekutif untuk menyamakan persepsi terkait arah kebijakan pembangunan daerah dan kebutuhan anggaran yang akan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS 2026. Penjajagan ini penting dilakukan untuk memastikan rencana program dan kegiatan OPD selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi misi Bupati Bantul.

Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo, S.T mengungkapkan bahwa forum penjajagan merupakan kesempatan awal bagi DPRD untuk mendengar langsung paparan dari OPD mengenai rencana

program, target, dan kebutuhan anggaran yang telah disusun. Melalui pembahasan ini diharapkan usulan yang disampaikan dapat lebih terukur, realistis, dan sesuai dengan prioritas daerah.

"Dengan mendengar langsung dari OPD, kami dapat memahami secara detail latar belakang setiap usulan program dan memastikan bahwa alokasi anggaran nantinya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Forum ini juga menjadi ajang untuk menyelaraskan visi pembangunan antara eksekutif dan legislatif, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran," ungkap Hanung.

Selama tiga hari pelaksanaan, masing-masing komisi DPRD memanggil OPD yang menjadi mitra kerjanya sesuai bidang tugas untuk melakukan diskusi dan menggali informasi mengenai rencana kerja dan kegiatan yang akan diajukan dalam APBD 2026. Proses ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sedang berjalan pada tahun anggaran 2025, sehingga kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki.



Hanung menegaskan bahwa tahapan penjajagan PPAS bukan hanya formalitas, melainkan langkah strategis yang menentukan arah pembangunan daerah. Dengan adanya pembahasan awal bersama OPD, DPRD dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan dan prioritas setiap sektor. Hal ini penting agar kebijakan anggaran yang disusun nantinya benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Tahapan ini bukan sekadar formalitas, melainkan proses strategis untuk menentukan arah pembangunan daerah," tegas Hanung.

Rangkaian rapat yang berlangsung selama tiga hari ini menghasilkan berbagai catatan dan masukan dari masing-masing komisi untuk dijadikan bahan dalam penyusunan dokumen KUA dan PPAS 2026. Seluruh masukan tersebut akan dihimpun dan dibahas lebih lanjut pada tahapan pembahasan resmi antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

DPRD Bantul berharap melalui proses penjajagan ini, penyusunan PPAS 2026 dapat berlangsung lebih efektif dan efisien, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Legislatif dan eksekutif diharapkan terus menjaga komunikasi yang baik agar rencana pembangunan yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan dokumen perencanaan daerah, tetapi juga mampu memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat.



Dengan berakhirnya rangkaian rapat ini, DPRD Bantul dan OPD mitra kerja siap memasuki tahap berikutnya dalam proses penyusunan APBD. Hasil penjajagan akan menjadi landasan penting dalam menentukan prioritas program, besaran anggaran, serta langkah-langkah strategis pembangunan Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran 2026.



Panitia Khusus D DPRD Bantul Mengadakan Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Karakter



Bantul, 9 Januari 2025 - Panitia Khusus (Pansus) D DPRD Bantul mengadakan public hearing untuk mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Karakter. Acara ini berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Bantul dan dipimpin oleh Ketua Pansus D, Ahmad Agus Sofwan, didampingi oleh Wakil Ketua, Herry Fahamsyah.

Anggota Pansus D adalah Pramu Diananto, Nur Yuni Astuti, Agustinus Sulistyodjati, Subhan Nawwawi, Muhamad Agusalm, Aurely Putri Anjani, dan Sapto Priyono. Dalam public hearing ini, undangan yang hadir terdiri dari Koordinator Pengawas TK, SD, SMP, dan SMA, perwakilan dari berbagai yayasan pendidikan, ikatan pemuda, dan forum anak di Bantul. Mereka turut menyampaikan masukan berharga untuk penyempurnaan Perda tersebut. Selain itu, Pansus D juga menghadirkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul dan Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), untuk memberikan penjelasan teknis terkait isi raperda.

Masukan dari para audiensi, baik dari pengawas pendidikan maupun yayasan, diharapkan mampu memperkaya substansi Raperda tentang Pendidikan Karakter. Langkah ini merupakan bagian dari upaya DPRD Bantul untuk menghasilkan peraturan daerah yang lebih komprehensif dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Bantul. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pembahasan ini, DPRD Bantul menegaskan komitmennya untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kemajuan pendidikan karakter bagi generasi muda (PCD, 2025).



Panitia Khusus E DPRD Bantul Mengadakan Public Hearing

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan



Bantul, [9/01] - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul melalui Panitia Khusus (Pansus) E menggelar public hearing sebagai bagian dari upaya untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang tengah dibahas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantul. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Bantul dan dipimpin oleh Ketua Pansus E, Suwandi, S.I.P., didampingi oleh Wakil Ketua Pansus, Sapto Sarosa. Selain itu, seluruh anggota Pansus E turut hadir untuk memastikan proses diskusi berjalan dengan baik dan produktif. Public hearing ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak, sehingga RAPERDA yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Bantul.



Dalam kegiatan tersebut, beberapa OPD memberikan paparan teknis terkait isi dan tujuan RAPERDA. OPD yang hadir antara lain Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian (DKUKMP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Penjelasan teknis ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada peserta mengenai konteks dan substansi RAPERDA, termasuk dampak yang mungkin

timbul setelah diterapkan.

Masukan dari peserta public hearing mencakup berbagai hal, seperti usulan perbaikan susunan isi, penyesuaian dengan aturan yang telah dirumuskan, hingga kebutuhan khusus masyarakat yang sesuai dengan topik RAPERDA. Tokoh masyarakat yang hadir juga memberikan pandangan berharga tentang cara agar RAPERDA ini lebih efektif dalam mengatasi masalah.

Pansus E mencatat semua masukan yang disampaikan oleh peserta. Masukan tersebut akan dibahas lebih



lanjut dalam rapat internal Pansus untuk dirumuskan menjadi penyempurnaan RAPERDA. Proses ini menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa RAPERDA yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bantul.



Kabupaten Bantul untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses legislasi. Dengan pendekatan yang inklusif, diharapkan Raperda yang sedang dibahas dapat mencerminkan kepentingan bersama dan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah (SS, 2025).

Rapat Pansus C agenda penyusunan Raperda Perubahan atas Daerah kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga



Bantul, 8 Januari 2025 - Dalam langkah memperkuat kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, Panitia Khusus (Pansus) C DPRD Kabupaten Bantul mengadakan rapat strategis di ruang rapat Komisi C. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus C, Datin Wisnu Pranyoto, didampingi oleh Wakil Ketua, Sugang Sudaryanta dan Anggota Pansus C. Bertujuan menyusun Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Diikuti oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), BAPPEDA, Kanwil Kemenkumham DIY, serta Badan Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Pentingnya pembaruan peraturan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sampah yang berkembang pesat. "Perubahan harus dilakukan secara strategis dengan tetap menjaga keselarasan regulasi" ujar Datin Wisnu Pranyoto.

Kabupaten Bantul menghasilkan sekitar 180 ton sampah per hari, namun angka ini berhasil ditekan menjadi 140 ton berkat program edukasi masyarakat. "Kami fokus pada pemilahan sampah sejak dari sumbernya, khususnya sampah organik, dan hasilnya sudah terasa," ujar DLH. Usulan untuk mengelola sampah organik di sumbernya juga mendapat apresiasi dari Datin Wisnu, yang menilai langkah ini dapat mengurangi beban pengelolaan lebih lanjut.

Pembahasan perubahan pada Pasal 17, yang awalnya mengatur penyediaan tempat sampah pilah. Berdasarkan masukan dari Siti Nur Hidayati, pasal ini disesuaikan menjadi kewajiban menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di lokasi masing-masing. Istilah "pilah" dihapus karena dinilai tidak relevan dan berulang.

Pasal 47 juga menjadi sorotan utama. Istilah "spesifik"

sempat diusulkan untuk dihapus oleh DLH karena dianggap perlu diatur dalam Perda tersendiri. Namun, setelah mempertimbangkan beberapa masukan diputuskan bahwa istilah "spesifik" tetap dipertahankan. Meski begitu, Pasal 47 akhirnya kembali ke rumusan awal dalam Perda Bantul No. 2 Tahun 2019. "Hal ini dilakukan karena persyaratan terkait pengelolaan sampah spesifik belum diatur lebih lanjut oleh undang-undang yang lebih tinggi," jelas DLH.

Selain itu, Pasal 49 disepakati untuk diubah. Perubahan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat sekitar TPST. Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak kegiatan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Pada Pasal 62 ayat 1, kata "pengelolaan" diganti menjadi "pengelola" untuk memperjelas subjek yang bertanggung jawab.

Penambahan pada Bab VII A Sistem Tanggap Darurat, mencakup Pasal 53A. Dirancang untuk memastikan kesiapan Kabupaten Bantul menghadapi kondisi darurat sampah. "Bab ini adalah langkah preventif yang krusial, sehingga kita tidak hanya bereaksi terhadap masalah, tetapi juga siap mengantisipasinya," ujar Datin Wisnu Pranyoto.

Sebagai penutup, Ketua Pansus C menegaskan bahwa semua keputusan yang telah disepakati akan diteruskan hingga tahap penyusunan laporan Raperda selesai. "Saya optimistis, perubahan ini akan menjadi tonggak penting untuk mewujudkan Kabupaten Bantul yang lebih bersih dan ramah lingkungan," katanya.

Dengan semangat kolaborasi dan harapan bahwa langkah-langkah yang diambil akan memberikan solusi nyata untuk permasalahan sampah di Kabupaten Bantul, menuju lingkungan yang lebih bersih dan lestari. (AAW, 2025)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bantul *Resmikan Perubahan KUA dan PPAS 2025*



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul menggelar rapat paripurna pada Senin (14/07) lalu untuk meresmikan perubahan atas dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bantul ini dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Hanung Raharjo, S.T., bersama tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul, yaitu Suradal, Titis Ajeng Ganis Mareti, S.T, dan Agung Laksmo S.Si., M.Sc., M.Ling. Forum ini menjadi bagian dari rangkaian tahapan penyusunan anggaran perubahan, yang harus diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda utama dalam rapat ini adalah penyampaian laporan, saran, dan pendapat dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bantul terkait hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Penyampaian ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terhadap perubahan arah kebijakan dan prioritas belanja daerah. Seluruh anggota DPRD hadir dalam rapat ini, didampingi jajaran pemerintah daerah seperti Wakil Bupati Bantul dan Sekretaris Daerah.

Badan Anggaran DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang merespons dinamika kondisi fiskal daerah serta kebutuhan pembangunan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam laporannya, Badan Anggaran menekankan perlunya penyesuaian terhadap sektor-sektor prioritas yang dinilai memerlukan penguatan berdasarkan kondisi aktual dan capaian kinerja tahun berjalan. Penyesuaian juga mempertimbangkan realisasi pendapatan semester pertama tahun 2025 yang memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah. Hal ini penting agar





kebijakan anggaran tetap realistis, namun tetap dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Selain itu, proses pembahasan perubahan KUA dan PPAS telah melalui diskusi intensif antara legislatif dan eksekutif. Dalam proses itu, berbagai data dan indikator kinerja anggaran dibahas bersama, termasuk proyeksi pendapatan asli daerah, alokasi belanja wajib, dan potensi pembiayaan. DPRD menekankan pentingnya menjaga disiplin fiskal, efisiensi belanja, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Dalam forum paripurna ini, semangat sinergi dan kemitraan antara dua lembaga pemerintahan daerah tersebut kembali terlihat dengan kuat.

Usai penyampaian laporan, rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Melalui forum yang terbuka, para pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan persetujuan atas perubahan KUA dan PPAS 2025. Masing-masing fraksi yang tergabung dalam DPRD menyatakan dukungannya secara bulat, dengan harapan agar dokumen ini segera ditindaklanjuti ke tahap penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Proses ini menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan program pembangunan daerah hingga akhir tahun anggaran.

Rapat paripurna diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara DPRD Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang menandai telah disahkannya dokumen perubahan KUA dan PPAS 2025. Penandatanganan dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Wakil Bupati Bantul sebagai perwakilan pihak eksekutif. Momen ini menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Nota kesepahaman tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi simbol kesepakatan

politik antara dua unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kesepakatan itu, pemerintah daerah memiliki dasar hukum dan kebijakan untuk segera melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan anggaran sesuai kebutuhan dan kondisi terkini. DPRD akan terus melakukan pengawasan atas pelaksanaan perubahan ini agar berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

Kesepakatan yang terjalin dalam forum ini juga menjadi wujud dari sinergi antar-lembaga dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diharapkan segera menyusun dan menyampaikan Rancangan Perubahan APBD ke DPRD agar proses anggaran berjalan tepat waktu dan program-program strategis yang telah direncanakan dapat segera terealisasi. Dengan tahapan yang berjalan lancar dan cepat, maka pelaksanaan program-program yang menyentuh langsung masyarakat dapat segera dilakukan.

Secara keseluruhan, rapat paripurna ini menjadi refleksi dari komitmen DPRD dan Pemkab Bantul untuk menjadikan perencanaan dan penganggaran sebagai instrumen pembangunan yang adaptif terhadap perubahan. Dalam konteks pembangunan daerah,



perubahan KUA dan PPAS bukanlah hal yang rutin semata, melainkan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran di tengah dinamika kebutuhan dan tantangan yang terus berkembang.

Melalui pendekatan yang kolaboratif antara eksekutif dan legislatif, diharapkan kebijakan anggaran daerah dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan mampu menciptakan dampak yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rapat paripurna ini tidak hanya menghasilkan dokumen yang sah secara hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan daerah dalam mengelola anggaran dengan penuh tanggung jawab dan transparansi.



RAPAT PARIPURNA DPRD BANTUL Sahkan Perubahan APBD 2025



BANTUL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul menggelar rapat paripurna pada Jumat (29/8/2025) di ruang rapat DPRD Bantul. Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sekaligus pengambilan keputusan.

Rapat paripurna yang digelar sebagai tindak lanjut dari pembahasan Badan Anggaran (Banggar) sebelumnya ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo, S.T. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Bantul, H. Aris Suharyanta, S.Sos., M.M., bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran unsur eksekutif tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian pembahasan bersama legislatif guna memastikan proses perubahan APBD berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan itu, laporan Badan Anggaran disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bantul, Agung Laksmo, S.Si., M.Sc., M.Ling. Dalam laporannya, Agung memaparkan sejumlah poin penting dari hasil



evaluasi Gubernur serta penyesuaian yang diperlukan agar Rancangan Perubahan APBD 2025 dapat selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo, menegaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian penting dari siklus penganggaran daerah. Menurutnya, pembahasan dan keputusan yang diambil harus benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat Bantul. "Kami memastikan bahwa perubahan APBD ini tetap sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula bahwa seluruh proses evaluasi dan penyesuaian dilakukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran. DPRD berharap, perubahan APBD 2025 dapat menjadi instrumen yang lebih tepat sasaran dalam mendukung program pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dan pelayanan publik.

Dengan penyampaian laporan Banggar dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna ini, DPRD Bantul menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pembangunan daerah agar berjalan secara berkeadilan dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.



Rapat Paripurna DPRD Bantul Sahkan Tiga Raperda Strategis

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul kembali menyelenggarakan rapat paripurna pada Senin (28/07) lalu, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bantul. Dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD, para anggota dewan, Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih, jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul, serta tamu undangan, Rapat paripurna kali ini membahas dan menetapkan tiga agenda utama yang berkaitan dengan penyusunan dan pengelolaan regulasi serta anggaran daerah. Ketiga agenda tersebut mencakup penyampaian laporan dan pengambilan keputusan terhadap perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, serta hasil evaluasi Gubernur atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Agenda pertama diawali dengan penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 6 Tahun 2023. Bapemperda menyampaikan bahwa rancangan tersebut telah melalui proses pembahasan bersama perangkat daerah terkait dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Usai penyampaian laporan, DPRD melakukan pengambilan keputusan dan seluruh fraksi menyatakan persetujuan. Dengan demikian, raperda tersebut resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Perubahan perda ini menjadi bagian dari penyesuaian regulasi nasional dan penguatan kebijakan fiskal daerah.

Agenda kedua adalah penyampaian laporan, saran, dan pendapat dari Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Laporan ini merupakan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Dalam laporannya, Badan Anggaran menyampaikan ringkasan terhadap penyesuaian asumsi pendapatan dan belanja, serta beberapa catatan umum untuk menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten.

Setelah laporan dibacakan, DPRD kembali melaksanakan pengambilan keputusan, dan seluruh anggota dewan menyatakan persetujuan terhadap raperda tersebut. Bupati Bantul kemudian menyampaikan pendapat akhir yang pada prinsipnya mendukung hasil pembahasan bersama DPRD dan menegaskan bahwa perubahan APBD 2025 ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bantul.

Agenda terakhir dalam rapat paripurna adalah penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap hasil evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Laporan ini memuat tanggapan atas hasil evaluasi yang diberikan Gubernur, serta menyatakan bahwa catatan dan rekomendasi yang disampaikan telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan.

DPRD kemudian menyatakan persetujuan terhadap raperda tersebut melalui pengambilan keputusan, yang disahkan secara musyawarah mufakat. Dengan disetujuinya raperda ini, maka proses



pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024 dinyatakan selesai secara administratif dan hukum. Dalam penutupan rapat, Ketua DPRD menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan, jajaran Pemerintah Kabupaten, serta pihak-pihak yang telah mendukung proses pembahasan ketiga raperda tersebut. Ia berharap keputusan yang diambil dapat segera ditindaklanjuti dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bantul.

Secara keseluruhan, rapat paripurna ini mencerminkan komitmen antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjaga sinergi dalam penyusunan kebijakan daerah. Pengambilan keputusan terhadap ketiga raperda tersebut menjadi bagian penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dengan telah disahkannya perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan APBD 2025, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, Pemerintah Kabupaten Bantul bersama DPRD menyatakan siap untuk melanjutkan program-program pembangunan yang telah dirancang, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.



Komisi A DPRD Bantul Lakukan Sidak IKM di Kalurahan Mulyodadi dan Mesin e-KTP di Kecamatan Pundong

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta peninjauan kondisi mesin pembuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di dua lokasi, yakni Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, dan Kecamatan Pundong. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan standar dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sidak yang dimulai sejak pagi hari ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Bantul, Jumakir, dan diikuti anggota Komisi A. Rombongan terlebih dahulu mengunjungi Kalurahan Mulyodadi, kemudian melanjutkan peninjauan ke Kecamatan Pundong pada siang harinya.

Fokus utama sidak kali ini adalah untuk meninjau proses pelayanan KTP, menilai tingkat kepuasan masyarakat melalui pelaksanaan survei IKM, serta melihat kondisi dan kesiapan mesin pencetak KTP (alat perekam dan printer blanko) di tingkat kecamatan.

"Pelayanan administrasi kependudukan merupakan pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat. Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan cepat, ramah, dan berkualitas," ujar Jumakir

saat ditemui di sela-sela sidak.

Usai dari Kalurahan Mulyodadi, rombongan melanjutkan peninjauan ke Kecamatan Pundong. Fokus pengawasan di kecamatan ini adalah memastikan kinerja mesin pencetak e-KTP dalam kondisi baik dan siap melayani masyarakat tanpa kendala.

Dalam kunjungannya, tim Komisi A mendapati bahwa sebagian besar pelayanan administrasi kependudukan berjalan cukup lancar. Namun demikian, masih ditemukan adanya kendala teknis yang sesekali menyebabkan keterlambatan pencetakan e-KTP, seperti gangguan jaringan dan masa pakai peralatan yang sudah menurun.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Bantul, Jumakir, menyampaikan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap sarana dan prasarana layanan publik yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

"Kami menemukan masih ada mesin e-KTP yang memerlukan perawatan berkala agar tidak menghambat proses pelayanan. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan dan pembaruan alat, karena layanan administrasi kependudukan sangat vital bagi masyarakat," tegas Jumakir.



Salah satu agenda utama sidak kali ini adalah memantau pelaksanaan dan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di unit layanan publik. IKM menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan profesionalitas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan.

Dari hasil dialog dengan petugas pelayanan dan masyarakat di lapangan, diketahui bahwa sebagian besar warga merasa cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan, terutama terkait kecepatan dan keramahan petugas. Namun, masih ada masukan agar waktu pelayanan bisa diperpendek, terutama pada hari-hari dengan antrean tinggi.

"Indeks Kepuasan Masyarakat bukan hanya sekadar angka di atas kertas. Ini adalah cerminan nyata dari kualitas pelayanan publik kita. Maka, hasil survei IKM harus dijadikan dasar perbaikan dan inovasi layanan ke depan," jelas Jumakir.

Selain melakukan evaluasi terhadap kondisi fisik dan kinerja mesin e-KTP, Komisi A juga mendorong agar pemerintah kalurahan dan kecamatan terus berinovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu poin penting yang disoroti dalam sidak kali ini.

Menurut Jumakir, digitalisasi pelayanan publik adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Ia berharap instansi di tingkat kecamatan dan kalurahan bisa terus beradaptasi dengan sistem layanan berbasis digital, seperti antrian online, pelaporan keluhan masyarakat, hingga sistem evaluasi IKM berbasis aplikasi.

"Kami berharap ke depan pelayanan publik di Bantul dapat terintegrasi secara digital, agar masyarakat bisa



mendapatkan layanan dengan cepat, mudah, dan transparan. Ini sekaligus mendukung visi pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," ungkapnya

Meski masih ada beberapa catatan teknis, Komisi A DPRD Bantul memberikan apresiasi terhadap kinerja aparatur di Kalurahan Mulyodadi dan Kecamatan Pundong. Dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dinilai sudah menunjukkan kemajuan yang positif.



Dalam kesempatan yang sama, Komisi A juga menekankan pentingnya pengawasan internal secara berkelanjutan. Lurah dan Camat diharapkan melakukan monitoring rutin terhadap alat-alat pelayanan seperti komputer, jaringan internet, dan mesin pencetak e-KTP, agar pelayanan tidak terganggu.

"Kami mengapresiasi kinerja teman-teman di lapangan yang tetap semangat memberikan layanan meskipun dengan sarana yang terbatas. Namun, kami juga mengingatkan agar pemeliharaan alat dan peningkatan kapasitas SDM terus dilakukan demi pelayanan yang lebih baik," ujar Jumakir menambahkan.

Sidak ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga momentum memperkuat kolaborasi antara DPRD, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kalurahan. Komisi A berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul dalam memantau kebutuhan alat dan peningkatan mutu pelayanan kependudukan.

Selain itu, hasil sidak akan dijadikan bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar dilakukan perbaikan dan pembaruan fasilitas pelayanan publik, serta peningkatan pelatihan bagi petugas.

"Komisi A akan menyampaikan hasil temuan ini kepada pihak eksekutif sebagai bahan evaluasi. Kami berharap sinergi ini menghasilkan solusi konkret yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tutup Jumakir. (NA)



KOMISI B DPRD BANTUL TINJAU RENCANA KOPERASI NELAYAN MERAH PUTIH DAN TPR PANDANSIMO

Komisi B DPRD Kabupaten Bantul melakukan peninjauan lapangan ke kawasan Pantai Baru, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Senin (6/10/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang akan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Poncosari, sekaligus memastikan kesiapan penataan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) wisata di sekitar Jembatan Pandansimo.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi B yang membidangi perekonomian, perindustrian, dan UMKM melihat langsung lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program nasional ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi pesisir melalui model koperasi yang dikelola masyarakat lokal.

Ketua Komisi B DPRD Bantul, dalam kesempatan itu, menyampaikan bahwa pembangunan kampung nelayan dengan basis koperasi diharapkan menjadi tonggak baru bagi kesejahteraan nelayan di wilayah selatan.

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Poncosari dikurirkan anggaran sekitar Rp 8,9 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membangun berbagai fasilitas seperti kios perbekalan, pabrik es, kantor pengelola, bengkel nelayan, serta kios kuliner. Setelah selesai, pengelolaan sepenuhnya akan diserahkan kepada KDMP Poncosari, dengan melibatkan nelayan dan warga sekitar sebagai anggota aktif.

Selain meninjau proyek koperasi nelayan, Komisi B juga memantau persiapan penataan TPR (Tempat Pemungutan Retribusi) wisata di kawasan selatan. Penyesuaian lokasi TPR dilakukan seiring dengan akan dibukanya Jembatan Pandansimo, yang menjadi akses strategis penghubung antara Bantul dan Kulon Progo melalui Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Pemerintah daerah menyiapkan opsi TPR sementara

dengan tenda darurat, sebagai solusi jika lokasi permanen belum siap saat jembatan mulai dibuka untuk umum. Komisi B menilai langkah ini penting untuk menjaga kelancaran arus wisatawan sekaligus memastikan pendapatan daerah dari sektor retribusi tetap berjalan optimal.

Kedua proyek yang ditinjau - pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan penataan TPR Pandansimo - berada di kawasan strategis pertumbuhan ekonomi selatan Bantul. Kehadiran infrastruktur baru seperti jembatan dan JJLS membuka peluang besar bagi pengembangan sektor perikanan dan pariwisata.

Komisi B menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara dinas perikanan, pariwisata, dan koperasi, agar potensi ekonomi ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan, keberadaan KNMP juga diharapkan memperkuat ekosistem wisata berbasis komunitas di wilayah pesisir.

DPRD Bantul mendorong agar proyek Kampung Nelayan Merah Putih dapat diselesaikan sesuai target waktu, dengan tata kelola yang transparan dan partisipatif. Selain itu, kapasitas kelembagaan koperasi perlu diperkuat agar mampu mengelola usaha perikanan, kuliner, dan wisata secara profesional.

"Keberhasilan program ini akan menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam membangun ekonomi berbasis potensi lokal. Kami berharap masyarakat benar-benar menjadi pelaku utama, bukan hanya penonton," pungkas perwakilan Komisi B.

Kunjungan ini ditutup dengan sesi dialog bersama perwakilan nelayan, perangkat kalurahan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul. Semua pihak sepakat untuk menjaga komitmen agar pembangunan di kawasan pesisir selatan berjalan berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan warga

Komisi C DPRD Bantul Sidak TPST Modalan, Tinjau Pengelolaan dan Inovasi Pemanfaatan Sampah



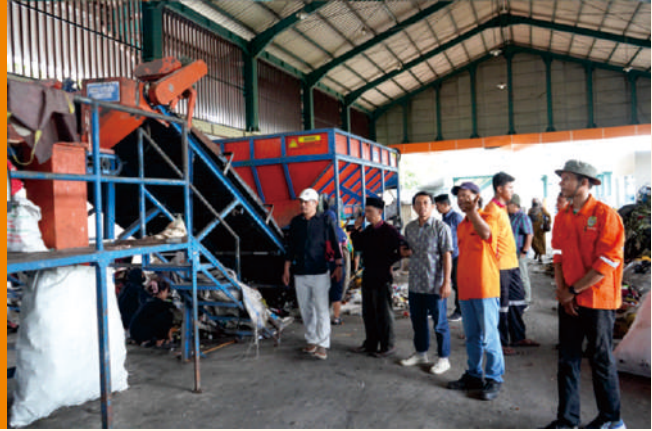
Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Modalan pada Selasa (11/8) lalu. Dipimpin secara langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bantul dan didampingi oleh para anggota komisi serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul beserta jajaran, sidak ini dilakukan sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pengelolaan sampah di wilayah Bantul, khususnya di TPST Modalan yang berada di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup. Fokus utama kegiatan adalah untuk memantau secara langsung operasional TPST Modalan, melihat alur pengelolaan sampah, serta meninjau inovasi pemanfaatan sampah yang telah dikembangkan di fasilitas tersebut.

Saat ini, TPST Modalan memiliki 50 orang pekerja dengan kapasitas pengolahan sampah mencapai 49 ton per hari. Namun, hingga kini, volume sampah yang diolah baru berkisar antara 15-20 ton per hari. Meski demikian, upaya peningkatan kapasitas terus dilakukan agar fasilitas ini dapat mencapai target maksimalnya.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bantul, Dwi Kristiantoro, S.T. menyampaikan bahwa sidak ini bertujuan memastikan TPST Modalan dapat beroperasi dengan optimal. Ia menegaskan, pengelolaan sampah merupakan salah satu isu penting di Bantul, mengingat volume sampah yang terus meningkat setiap harinya.

"Kami ingin memastikan bahwa program pengelolaan sampah ini berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kalau nanti TPST Modalan ini terbukti berhasil dan berjalan dengan baik, kami akan dorong untuk diterapkan di TPS-TPS lain di wilayah Bantul," ungkap Dwi Kristiantoro, S.T.

Dalam tinjauan lapangan, rombongan Komisi C DPRD Bantul berkesempatan melihat langsung proses



pemilahan, pengolahan, hingga pemanfaatan sampah di TPST Modalan. Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah pemanfaatan sampah plastik dan anorganik untuk diproduksi menjadi paving blok. Inovasi ini dinilai sebagai langkah kreatif yang tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA, tetapi juga menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis.

Ketua Komisi C menambahkan bahwa inovasi seperti ini sangat penting untuk diperluas, karena selain mengurangi beban penumpukan sampah, juga memberikan peluang usaha baru bagi masyarakat.

"Kita perlu mendorong terciptanya ekosistem pengelolaan sampah yang tidak hanya fokus pada pembuangan, tetapi juga pengolahan dan pemanfaatan kembali menjadi produk yang berguna," jelasnya.

Sidak yang berlangsung selama hampir dua jam ini diakhiri dengan dialog antara anggota Komisi C DPRD Bantul dan jajaran DLH. Dialog membahas rencana pengembangan fasilitas, peningkatan kapasitas produksi, serta strategi replikasi model TPST Modalan di tempat lain. Semua pihak sepakat bahwa keberhasilan TPST Modalan akan menjadi model percontohan bagi pengelolaan sampah di Bantul.

Pengelolaan sampah menjadi isu strategis di Bantul seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Dengan inovasi seperti produksi paving blok dari sampah plastik, diharapkan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi beban, tetapi juga menjadi peluang ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. DPRD Bantul, melalui Komisi C, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendorong pengembangan program-program pengelolaan sampah yang inovatif dan berkelanjutan.





Selasa, 19 Agustus 2025 15:15 WIB

BANTUL - Komisi C DPRD Kabupaten Bantul melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek pembangunan infrastruktur di Dusun Sindet, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Selasa (12/8) lalu. Sidak difokuskan pada pekerjaan pembangunan sayap kanan dan kiri pintu penguras Daerah Irigasi (DI) Sindet serta Jembatan Sindet 2.

Rombongan sidak terdiri dari anggota Komisi C DPRD Bantul didampingi pejabat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul. Hadir di antaranya Kepala Bidang Sumber Daya Air Wartini, S.T., M.T. serta Kepala Bidang Bina Marga Eka Budi Santosa, S.T., M.T.

Dalam peninjauan, anggota dewan memeriksa secara langsung progres pekerjaan di lapangan. Pembangunan sayap pintu penguras DI Sindet terlihat sudah memasuki tahap pengerjaan struktur beton, sementara Jembatan Sindet 2 masih dalam proses pemasangan pondasi dan tiang penyangga.



Komisi C DPRD Bantul Sidak Pembangunan Irigasi dan Jembatan Sindet 2



Anggota Komisi C, Suratman, menegaskan pentingnya pembangunan tersebut bagi masyarakat setempat. *"Pintu penguras sangat vital untuk mengatur aliran air ke lahan pertanian, sedangkan Jembatan Sindet 2 menjadi jalur penghubung yang strategis bagi mobilitas warga,"* ungkap Suratman.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga, Eka Budi Santosa S.T., M.T, menambahkan jembatan tersebut akan diintegrasikan dengan perbaikan ruas jalan di sekitarnya.

"Manfaatnya tidak hanya untuk mobilitas warga, tetapi juga mendukung distribusi hasil pertanian," ujar Eka.

Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPKP Bantul, Wartini S.T., M.T menjelaskan proyek ini masuk program prioritas daerah untuk peningkatan infrastruktur irigasi. *"Dengan pintu penguras yang optimal, banjir dapat diminimalisir saat musim hujan dan aliran air tetap terjaga di musim kemarau,"* jelas Wartini.

Komisi C DPRD Bantul memastikan akan terus memantau progres hingga proyek selesai. Jika ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, pihak pelaksana diwajibkan melakukan perbaikan. Proyek ini didanai APBD Bantul 2025 dan ditargetkan rampung dalam beberapa bulan ke depan. (NA)



KUNJUNGAN DAN SIDAK INFRASTRUKTUR KOMISI D DPRD BANTUL

di SMPN 1 Bantul dan SMPN 1 Kasihan

Bantul, 9 Juli 2025 - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul melakukan kunjungan kerja sekaligus inspeksi mendadak (sidak) ke dua sekolah menengah pertama, yaitu SMP Negeri 1 Bantul dan SMP Negeri 1 Kasihan. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung kondisi infrastruktur, sarana prasarana, serta fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah.



Rombongan Komisi D dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Bantul bersama sejumlah anggota, didampingi oleh staf sekretariat DPRD. Kedatangan mereka disambut hangat oleh kepala sekolah, para guru, serta jajaran tenaga kependidikan di kedua sekolah. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban di ruang kepala sekolah masing-masing.

Fokus Kunjungan: Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pendidikan

Dalam pertemuan di SMP Negeri 1 Bantul, pihak sekolah memaparkan berbagai kondisi bangunan serta kebutuhan sarana penunjang pembelajaran. Beberapa ruang kelas dan fasilitas penunjang disebut memerlukan perbaikan akibat faktor usia bangunan dan intensitas penggunaan. Selain itu, kebutuhan akan peningkatan kapasitas ruang laboratorium komputer dan jaringan internet juga menjadi perhatian utama.



Ketua Komisi D DPRD Bantul menyampaikan bahwa sidak ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan.

"Kami ingin memastikan bahwa sekolah-sekolah di Bantul memiliki sarana prasarana yang layak, aman, dan mendukung proses pembelajaran modern. Apa yang kami lihat hari ini akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja dengan Dinas Pendidikan," ungkapnya.

Kunjungan ke SMP Negeri 1 Kasihan



Setelah dari SMPN 1 Bantul, rombongan melanjutkan kunjungan ke SMP Negeri 1 Kasihan. Di sekolah ini, Komisi D juga mendengarkan pemaparan dari pihak sekolah mengenai kondisi infrastruktur dan kebutuhan sarana pendukung. Kepala SMPN 1 Kasihan menyampaikan bahwa sekolah terus berupaya menjaga kualitas lingkungan belajar dengan sumber daya yang ada, namun masih terdapat keterbatasan dalam hal fasilitas, seperti peremajaan komputer dan perawatan bangunan.

"Kami berharap dukungan dari DPRD dapat mempercepat perbaikan fasilitas di sekolah, terutama untuk mendukung kegiatan asesmen berbasis komputer dan pembelajaran berbasis digital," ujar Kepala SMPN 1 Kasihan.

Diskusi dan Rencana Tindak Lanjut

Selama kegiatan berlangsung, para anggota Komisi D juga berdiskusi dengan pihak sekolah mengenai berbagai persoalan non-fisik, seperti distribusi tenaga pendidik, kebutuhan pelatihan guru, serta dukungan untuk program penguatan Profil Pelajar Pancasila yang sedang digencarkan di tingkat SMP.

Hasil dari kunjungan dan sidak ini akan menjadi bahan rekomendasi DPRD Bantul kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul, agar dapat ditindaklanjuti melalui program prioritas di bidang pendidikan.

Penutup dan Harapan

Kegiatan kunjungan kerja Komisi D DPRD Bantul diakhiri dengan sesi ramah tamah dan foto bersama. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi atas perhatian DPRD terhadap dunia pendidikan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan satuan pendidikan dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan di Kabupaten Bantul.



Rombongan kemudian meninjau langsung beberapa titik, termasuk ruang guru, ruang laboratorium komputer, serta area halaman sekolah. Dari hasil peninjauan, tampak bahwa sebagian fasilitas komputer sudah perlu pembaruan untuk mendukung ujian berbasis digital dan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi informasi.

SUWANDI

Satu-satunya Anggota Legislatif Partai Ummat se DIY-Jateng

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bantul, Suwandi, bukan sosok baru di kancah politik Bantul. Namun di balik ketenangannya memimpin proses legislasi daerah, ada perjalanan panjang, bahkan berliku, dari seorang aktivis kampus Muhammadiyah hingga politisi tangguh yang kini menjadi satu-satunya wakil Partai Ummat di DPRD se-DIY dan Jawa Tengah itu.

Dari Aktivis Kampus ke Dunia Politik

Lahir di Bantul, 8 Desember 1962, Suwandi tumbuh dalam lingkungan yang akrab dengan dunia organisasi dan nilai-nilai perjuangan. Ia menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), jurusan Hubungan Internasional, dan menorehkan prestasi membanggakan sebagai lulusan terbaik kedua, cum laude. Sejak masa kuliah, darah aktivismenya sudah kental, aktif di organisasi Pemuda Muhammadiyah, Tapak Suci, hingga Muhammadiyah Daerah Bantul.

"Saya dulu aktivis kampus. Aktivis pemuda, aktivis Tapak Suci, bahkan pernah menjadi kepala eksekutif di Kantor Muhammadiyah Kabupaten Bantul," katanya.

Kedekatannya dengan Muhammadiyah menjadi fondasi kuat bagi perjalanan politiknya.

"Saya staf di Muhammadiyah selama 20 tahun. Dari situlah saya belajar manajemen, kepemimpinan, dan pelayanan publik," ujarnya.

Empat Dekade Bersama Politik

Suwandi mengenal politik sejak 1985, ketika ia bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dari kader tingkat kecamatan, ia naik perlahan. Tahun 1985 ia menjadi anggota Komisaris Kecamatan Bantul, lalu Ketua Komisaris pada 1990.

Karier politiknya terus menanjak hingga menjadi pengurus harian DPC PPP Kabupaten Bantul pada 1999. Dari situ, langkah ke parlemen terbuka lebar.

"Tahun 2004 saya diusulkan partai untuk maju jadi caleg dan alhamdulillah jadi," ungkapnya.

Ia kemudian kembali aktif pada 2014 sebagai Wakil



Ketua Komisi A DPRD Bantul, sebelum sempat "off" pada 2019 akibat dinamika politik internal partai.

Namun politik, baginya, bukan sekadar jabatan. Ia menyebut dunia itu sebagai ladang perjuangan nilai. Maka ketika Partai Ummat muncul dengan platform yang menurutnya sejalan dengan semangat Parmusi dan perjuangan Islam moderat, Suwandi kembali terjun. Tahun 2024 ia kembali nyaleg dan menang.

"Cuma saya satu-satunya yang terpilih dari Partai Ummat di seluruh DIY dan Jawa Tengah. Istimewa, tapi juga berat," jelasnya.

Memimpin Bapemperda: Mengawal Regulasi untuk Rakyat

Kini, di DPRD Bantul periode 2024–2029, Suwandi dipercaya sebagai Ketua Bapemperda, sebuah posisi strategis yang berperan mengawal lahirnya setiap rancangan peraturan daerah (raperda).

"Bapemperda itu tugasnya tiga memproses, mengendalikan, dan mengoordinasikan. Dari tahap penyusunan hingga pengesahan, Bapemperda menjadi dapur utama semua perda," jelasnya.



Namun, di balik tugas teknis itu, Suwandi menekankan pentingnya kebersamaan dan integritas anggota dewan.

"Butuh sinergi antarsumber daya manusia. Jangan sampai pembahasan perda hanya dilakukan oleh segelintir orang," ucapnya. "Kalau hanya empat atau lima orang dari dua belas anggota yang bahas, itu bisa cacat hukum. Semua fraksi harus berdaya, tidak boleh pasrah."

Suwandi menambahkan, Bapemperda juga ikut memastikan bahwa proses Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dari tahap awal sampai akhir bisa selaras dengan pihak eksekutif. Hal ini dimaksudkan agar setiap raperda yang disahkan menjadi Perda nantinya tidak bertabrakan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi, tentunya dengan prioritas kebutuhan di masyarakat.

Antara Politik, Ngaji, dan Kebun

Di luar ruang rapat dewan, Suwandi berubah menjadi sosok sederhana yang akrab dengan tanah dan kehidupan alam. Di rumahnya di Dusun Bogoran, Trirenggo, Bantul, ia menata halaman penuh tanaman dan hewan ternak seperti bunga, cabai, ikan, dan burung peliharaan.

"Saya suka bersih-bersih, suka berkebun. Ada pacul, sekop, semua lengkap," ujarnya.

Kini, di usianya yang matang, Suwandi mengaku lebih memilih kehidupan yang seimbang.

"Kalau dulu aktivitas saya penuh, sekarang lebih banyak ngaji. Kalau diminta, saya ngisi ceramah juga. Saya mubaligh," ujarnya.

Meski berulang kali berpindah peran mulai dari aktivis, staf Muhammadiyah, legislator, hingga mubaligh arah perjuangan Suwandi tetap sama mengabdikan.

"Kalau bicara visi, masih sama. Bagaimana perjuangan politik bisa jadi jalan kebaikan bagi masyarakat," imbuhnya.

Dari kantor Muhammadiyah hingga kursi DPRD, dari kampus UMY hingga kebun kecil di rumahnya, Suwandi tetap setia pada prinsip yang ia tanam sejak muda politik adalah ladang ibadah, bukan sekadar jabatan.

Profil Suwandi

Tempat tanggal lahir : Bantul, 8 Desember 1962

Partai : Partai Ummat

Jabatan : Ketua Bapemperda DPRD Bantul

Periode : 2004-2009, 2014-2019, 2024-2029

Pendidikan : Hubungan Internasional UMY, Angkatan 1998

Status Keluarga : Menikah, dua putera.



Muhammad Dhavid

Penjaga Marwah DPRD Bantul



Di ruang kerjanya di kompleks DPRD Bantul, Muhammad Dhavid berbicara pelan tapi tegas. Tidak ada nada tinggi, tidak ada gestur berlebihan. Gaya bicaranya tenang, khas orang yang sudah kenyang pengalaman politik. Namun di balik ketenangan itu, ada kisah panjang tentang seorang mahasiswa peternakan yang memilih jalan politik sejak masa reformasi, dan kini dipercaya menjaga kehormatan lembaga legislatif daerahnya.

Awal dari Gerakan Kampus

Tahun 1999. Reformasi baru saja membuka ruang demokrasi setelah puluhan tahun terkekang. Di berbagai kota, kelompok-kelompok muda mulai membentuk partai baru. Di Jogja, salah satu yang lahir adalah Partai Keadilan (PK).

Di antara ribuan massa yang hadir dalam deklarasi partai tingkat DIY di Stadion Kridosono hari itu, ada seorang mahasiswa UGM yang masih menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Peternakan. Namanya Muhammad Dhavid.

"Saya masih mahasiswa semester akhir, angkatan 1994. Waktu itu ikut deklarasi PK di Jogja," kenangnya.

Sebelum itu, Dhavid bukan aktivis kampus yang gemar debat atau ikut organisasi intra kampus. Ia justru menempuh jalan sunyi dengan bergabung bersama komunitas dakwah kampus, berdiskusi tentang nilai, moral, dan arah bangsa. Dari situlah benih idealismenya tumbuh.

"Kalau di kampus saya enggak aktif organisasi. Namun

sering berinteraksi dengan teman-teman dakwah kampus. Dari situ ketemu banyak pemikiran baru tentang peran umat di politik," ujarnya.

Dari Simpatisan ke Penggerak Akar Rumput

Jauh sebelum kuliah, Dhavid sudah mengenal dunia politik meski sebatas simpatisan. Saat masih SMA, ia kerap mengikuti beragam agenda salah satu partai Islam saat itu. Namun begitu Partai Keadilan berdiri, arah hatinya mantap bergeser.

"Waktu itu kami semangat sekali. Baru reformasi, semua serba terbuka. Saya ikut mendukung PK dan langsung gabung di struktur tingkat kecamatan, di Pundong," katanya.

Dari sinilah karier politiknya dimulai, pengurus DPC PK (kemudian PKS) Pundong tahun 1999, lalu naik perlahan. Ia baru maju sebagai calon legislatif sepuluh tahun kemudian, pada Pemilu 2009, tetapi belum berhasil.

"Yang jadi waktu itu rekan yang lain. Saya belum rezeki," ujarnya.

Namun Dhavid bukan tipe yang gampang menyerah. Tahun 2014, ia kembali maju dari Dapil Bantul dan kali ini lolos.

“Periode pertama di Komisi C, yang ngurusi pembangunan dan infrastruktur daerah,” ujarnya.

Ia bertahan di komisi itu hingga dua periode, sebelum pada periode 2024–2029 dipercaya sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bantul sekaligus anggota Komisi A.

Ketua yang Tak Ingin Disorot

Ketika ditanya bagaimana bisa terpilih menjadi Ketua BK, Dhavid tertawa kecil.

“Ya hasil konstelasi politik di DPRD saja. Tapi memang saya minta di BK. Saya pengen bantu di situ,” ujarnya.

Bagi Dhavid, BK bukan lembaga yang menakutkan, tapi penjaga wibawa.

“Kami ingin DPRD Bantul ini tertib, beretika, dan menjunjung marwah lembaga. Kalau enam kali enggak hadir rapat paripurna tanpa alasan, baru kita beri teguran. Tapi sejauh ini teman-teman tertib kok,” katanya.

Ia menekankan, tugas BK bukan cuma menegakkan aturan, tapi juga menjaga rasa.

“BK itu ngemong roso. Kami ajak teman-teman untuk saling tepo seliro, menjaga citra lembaga di mata masyarakat. Kalau DPRD-nya tertib, rakyat juga percaya,” ungkapnya.

Gaya Hidup Sederhana

Ketika banyak pejabat di Jakarta disorot karena pameran kemewahan, Dhavid justru menanggapi dengan canda.

“Kalau di pusat ada yang *flexing*, pameran hidup mewah, kalau di Bantul mau pameran apa, Mas?” katanya sambil tertawa.

“Ora ono. Kita biasa-biasa saja. Enggak ada yang glamor,” jelasnya.

Kesederhanaan itu bukan pencitraan. Dhavid memang hidup sederhana bersama istri dan tiga putrinya di Pundong, kampung halaman yang tak pernah ia tinggalkan meski sudah tiga periode jadi anggota dewan.

“Kalau tidak ada agenda rapat, saya di rumah. Kadang ke ladang, kadang mengurus kegiatan masyarakat. Hidup ya seperti biasa saja,” ujarnya.

Bagi Dhavid, politik bukan soal kekuasaan, tapi soal

tanggung jawab.

“Saya melihat politik ini sebagai jalan dakwah, jalan pengabdian. Lewat DPRD, kita bisa bantu masyarakat secara nyata,” ujarnya.

Ia berharap lima tahun ke depan DPRD Bantul bisa bekerja lebih fokus pada pengawasan dan pelayanan publik.

“Yang penting masyarakat merasa punya wakil yang benar-benar mendengarkan,” katanya.

Ketika bicara tentang masa depan, Dhavid tak berbicara tentang jabatan, tapi tentang nilai.

“Menjaga kehormatan lembaga itu bukan cuma urusan BK, tapi urusan semua anggota dewan. Kalau kami jaga etika, kerja sungguh-sungguh, dan tetap dekat dengan rakyat, itu sudah bentuk kehormatan yang sesungguhnya,” pungkaskah dia.

Profil Muhammad Dhavid

Tempat tanggal lahir : Bantul, 16 Februari 1975

Fraksi : PKS

Jabatan : Ketua Badan Kehormatan DPRD Bantul, Anggota Komisi A

Periode : 2014-2019, 2019-2024, 2024-2029 (3 Periode)

Pendidikan : Fakultas Peternakan UGM, Angkatan 1994

Status Keluarga : Menikah, tiga putri



Ketua Komisi A Dprd Kabupaten Bantul,

JUMAKIR

Membangun Kabupaten Bantul Disemua Aspek

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, Jumakir merupakan satu diantara lima anggota DPRD Kabupaten Bantul yang cukup senior. Sebagaimana diketahui, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bantul empat periode secara beruntun. Mulai tahun 2009 dan kembali terpilih dalam pemilu 2024 lalu. Artinya 16 tahun berjalan sebagai anggota DPRD Bantul hingga 2029 nantinya.

"Semangat perjuangan itu kan tidak pernah akan berakhir. Satu hal yang sebenarnya menjadi komitmen kita yakni membangun Bantul dari A sampai Z atau membangun Kabupaten Bantul disemua aspek. Kabupaten Bantul cukup luas, penduduknya cukup banyak hampir diangka 982. 000 tersebar di 17 kecamatan 75 kalurahan dan 933 dusun. Dalam membangun Bantul harus dilakukan terus berkelanjutan. Selain itu pemerintah daerah dalam menjalankan programnya harus turun ke bawah, harus jemput bola bersama teman-teman DPRD. Tidak mungkin akan bisa menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Bantul ini tanpa kita jemput bola ataupun turun ke bawah. Mau bicara di bidang apapun," ujar Jumakir.

Jumakir mengungkapkan, ketika bicara target, bidang apapun jika sebatas mengandalkan hari kerja tentu sulit memenuhi target. Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah dalam hal ini bupati, wakil dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bekerja diluar jam dinas.

"Kita itu melakukan pekerjaan 24 jam non stop saja itu tidak selesai. Apalagi kita hanya mengacu pada jam

kerja, ini jelas tidak mungkin menyelesaikan sejumlah persoalan di masyarakat. Sebenarnya kedepan ini kita ingin Pemerintah Daerah dan juga teman-teman DPRD Bantul ini harus turun ke bawah. Mau bicara persoalan apapun, tidak mungkin akan bisa selesai sampai kapanpun," ujarnya.

Dijelaskan, ketika berbicara sampah, tidak mungkin Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyelesaikan permasalahan itu. Semua mesti terlibat didalamnya dari hulu sampai hilir. Mulai bupati, pemerintah daerah, DPRD Bantul sampai ke kalurahan dan pedukuhan.

"Kita harus sama-sama turun ke bawah, menyambangi masyarakat. Kalau hanya diberikan sosialisasi satu tahun sekali, itu tidak pernah akan didengarkan. Sosialisasi itu harus dilakukan dalam satu bulan, dua bulan tiga bulan ataupun 1 minggu itu harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Bila kita dari DPRD Bantul turun ke bawah dalam penanganan sampah. Paling tidak pemerintah daerah menyiapkan kantong sampah. Jadi biar sampah itu selesai ditingkat keluarga. Kita harus bisa memahami kepada masyarakat, dan sampah harus selesai tataran dikeluarga," ujar Jumakir.

Berbicara Pemerintah Daerah Bantul terdapat 24 Organisasi Perangkat Daerah 8 kepala bagian, 17 penewu, serta 75 lurah. Harus dipahami kedepan supaya tahu visi, misi bupati. Artinya perencanaan di tingkat APBD harus linier juga dengan ditingkat kalurahan. Hal tersebut penting agar ke depan bisa berjalan dengan baik.

"Sinkronisasi perencanaan ini yang harus dilakukan kalau di Kabupaten Bantul itu ada Bappeda di tingkat desa ada pangripto atau bagian perencanaan. (Roy)



KETUA KOMISI B DPRD KABUPATEN BANTUL, ARIF HARYANTO S.Si

Berkhidmat Melalui Advokasi Kebijakan dan Anggaran Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Bantul

BANTUL - Tanggal 13 Agustus 2009, menjadi momentum bersejarah dalam perjalanan karir politik Arif Haryanto S.Si sebagai anggota DPRD Kabupaten Bantul. Bagaimana tidak, ditanggal itulah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dilantik untuk pertama kalinya sebagai anggota DPRD Kabupaten. Menjadi anggota dewan periode pertama diusia 31 tahun, tentu hal tersebut tidaklah mudah. Namun karena sejak awal Arif Haryanto punya tekad menjadi anggota dewan untuk berkhidmat (melayani-red) masyarakat, melalui advokasi kebijakan dan anggaran demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bantul. Sehingga politisi bersahaja itu diberikan kemudahan dalam berkiprah sebagai anggota dewan.

Arif Haryanto mengungkapkan, setelah dilantik untuk pertama kali kemudian langsung duduk menjadi Wakil Ketua DPRD Bantul sampai 2014. Setelah itu, tahun 2014 oleh partai dorong untuk berkompetisi dalam perhelatan Pemilu di jenjang lebih tinggi. Waktu itu partai mendorong agar menjadi Caleg di DPRD DIY, namun waktu itu tidak terpilih.

Namun kegagalan dalam Pemilu 2014 tidak lantas membuat spirit Arif untuk terus berkhidmat redup.

"Kemudian dalam Pemilu 2019-2024 terpilih kembali di DPRD Bantul dan menduduki Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Bantul. Dan alhamdulillah dalam pemilihan kemarin atau periode 2024-2029 terpilih kembali menjadi anggota DPRD Bantul dan saat ini sebagai Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bantul," ujar Arif.

Dijelaskan, berdasarkan hasil inventarisasi, sejauh ini terdapat persoalan penting yakni sudah dibukanya Jembatan Pandansimo.

"Dibukanya jembatan tersebut tentu menjadi tantangan baru dalam pengembangan pariwisata pantai selatan, nelayan, UMKM dan pertanian. Oleh karena itu perlu rencana matang dalam membangun kawasan pantai selatan Bantul. Sehingga keberadaan Jembatan Pandansimo memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat," ujar Arif.

Selain itu tidak kalah penting adalah di sektor pendapatan daerah. Salah satunya problem pengurangan transfer keuangan pusat ke daerah. Selain itu dibebaskannya pajak PBB lahan pertanian pangan perlu dilakukan terobosan intensifikasi pendapatan khususnya pajak daerah. "Diantaranya dengan memaksimalkan pada sektor pajak yang lain, diantaranya pajak reklame, restoran dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan," ujar Arif.

Hingga sekarang ini Arif bercita-cita berkomitmen mendukung program bupati khususnya bidang pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan. Termasuk mengembangkan dan memberdayakan Kelompok Wanita Tani untuk memanfaatkan lahan pekarangan menjadi lahan produktif pertanian.



KETUA KOMISI C DPRD KABUPATEN BANTUL DWI KRISTIANTORO, ST

Mewujudkan Kabupaten Bantul yang Semakin Baik

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bantul, Dwi Kristiantoro, ST terus menjaga spirit dalam membangun Kabupaten Bantul khususnya di sektor pembangunan infrastruktur. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Bantul empat kali secara beruntun termasuk periode 2024-2029, politisi PDI Perjuangan ini bertekad memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Bantul yang semakin baik dengan merealisasikan program-program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

"Periode 2024-2029 ini merupakan yang keempat kali saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Bantul. Dalam kurun waktu tersebut, kebetulan periode sebelumnya saya juga menjabat sebagai Ketua Komisi C. Saya bersyukur, partai saya kembali memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Ketua Komisi C lagi. Di periode ini saya fokus mewujudkan perbaikan infrastruktur khususnya pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan irigasi teknis yang sangat dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat Bantul yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian," ujar Dwi Kristiantoro.

Meski begitu, Dwi mengaku kiprahnya di Komisi C DPRD Bantul belumlah seperti yang diharapkan.

"Belum sesuai dengan harapan saya pribadi, atau belum sesuai targetlah. Sehingga saya berharap betul amanah ini dapat saya emban dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mohon doanya, saya bisa menuntaskan program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Bantul, baik yang berasal dari anggaran APBD Bantul maupun yang dari pusat atau APBN. Yang muaranya tentu adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bantul" ujar Dwi.

Menurut Dwi, masih satu lagi 'PR' tambahan yakni terkait dengan penanganan sampah.

"Harus kita akui bahwa permasalahan sampah di Bantul

masih belum terselesaikan dengan baik. Banyak PR yang harus secara bersama-sama kita lakukan dalam mengurai dan mengurangi permasalahan sampah di kabupaten Bantul. Makanya kami terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul," ujar Dwi.

Kolaborasi yang selama ini terjalin antara legislatif dan eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah cukup terbuka.

"Kami juga welcome terkait program-program unggulan yang menjadi prioritas dari eksekutif khususnya yang tertuang dalam kesepakatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Menurut Dwi, selama ini legislatif dan eksekutif bisa mencapai kesepakatan walaupun tentu ada dinamika. "Ini tentu sebuah momentum untuk mewujudkan Kabupaten Bantul yang semakin baik," ujarnya.

Tahun 2026 mendatang ada permasalahan yang menjadi tantangan bersama, dengan dipangkasnya anggaran transfer dari pusat sebesar 156 M.

"Ini menjadi pergumulan kami di DPRD, bersama-sama dengan eksekutif tentunya. Kami berharap pada saat pembahasan APBD tahun 2026 kami tetap bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Bantul." ujar Dwi.



KETUA KOMISI D DPRD KABUPATEN BANTUL

Pramu Diananto Indratriatmo

Kami Berkerja untuk Kesejahteraan Masyarakat Bantul

Mengabdikan diri untuk melayani masyarakat menuju masyarakat Kabupaten Bantul sejahtera menjadi salah satu motivasi Pramudianto Indratriatmo menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karir politik politisi PDI Perjuangan tersebut cukup moncer, tiga kali beruntun terpilih sebagai wakil rakyat.

Periode I 2014-2019, periode II : 2019-2024, periode III : 2024-2029.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bantul, Pramudianto Indratriatmo mengungkapkan, bila mitra kerja Komisi D DPRD Kabupaten Bantul adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

"Untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah OPD sama pentingnya. Karena semua program ke dua dinas tersebut merupakan program mandatory dari pemerintah pusat," ujar Pramudianto Indratriatmo.

Menurut Nanto, sapaan akrabnya mengungkapkan, jika dua OPD tersebut sama pentingnya untuk menjadi perhatian Komisi D DPRD Kabupaten Bantul.

"Perhatian secara penganggaran dan pengawasan, supaya program dari ke 2 OPD tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bantul. Untuk Dikpora kami mendorong agar peningkatan Bosda dan pembangunan sarana sekolah yang aman dan nyaman,"

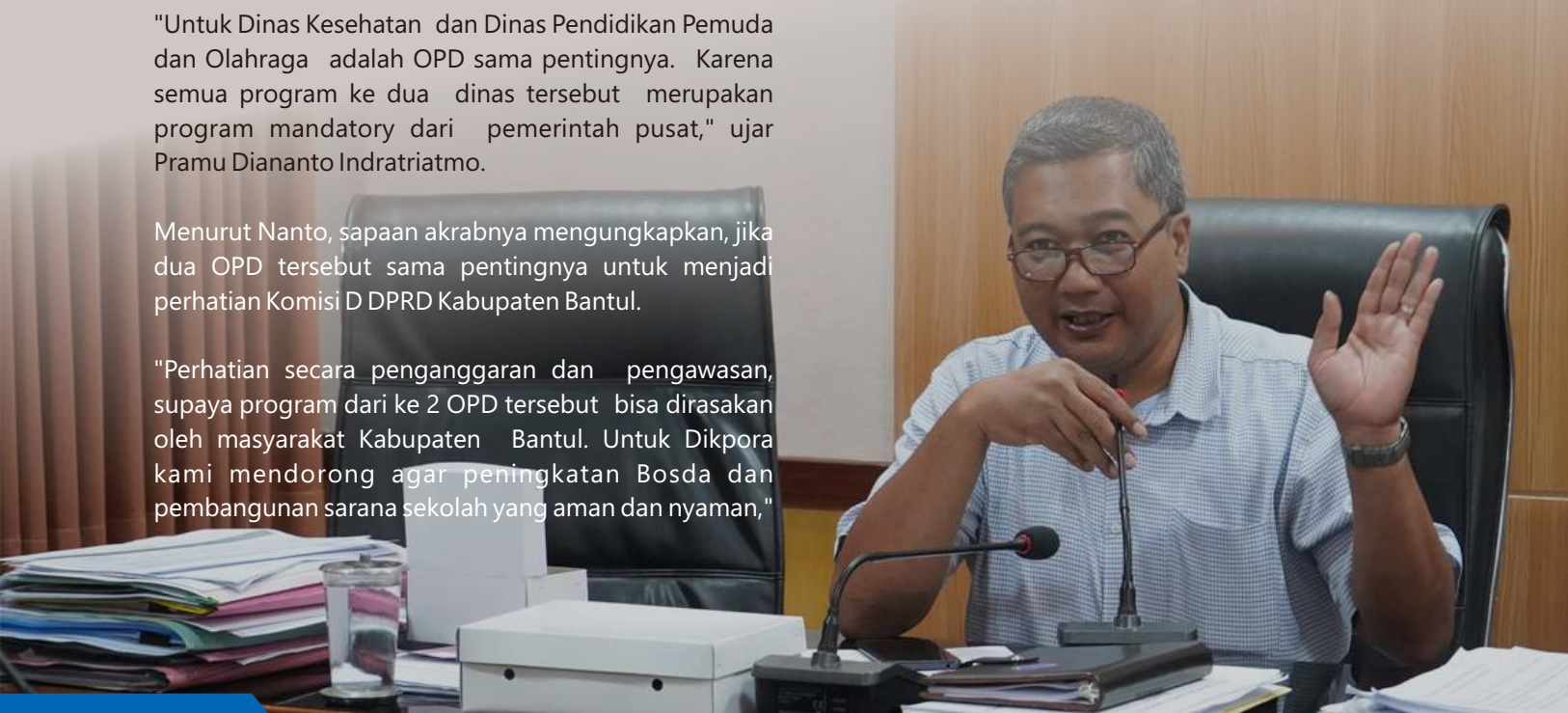
jelasnya.

Pramudianto Indratriatmo mengungkapkan, khusus untuk Dinas Kesehatan Bantul. Pihaknya mendorong agar peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas di Kabupaten Bantul dan RSUD Panembahan Senopati Bantul.

"Kami juga mengusulkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk ke 2 OPD tersebut," ujarnya.

Selain itu, selama ini Komisi D DPRD Kabupaten Bantul berkolaborasi sangat baik.

"Kami berkerja untuk Kesejahteraan Masyarakat Bantul," ujarnya. (Roy)





**GEDUNG DPRD
KABUPATEN BANTUL**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Jl Jendral Sudirman No. 85 Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta